



AKUNTANSI BERKELANJUTAN MENUJU MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK

PENULIS :

**Hardianti Pertiwi, Renika Hasibuan, Ika Prayanthi,
Annisa Nabila Hasan, Arnadi Chairunnas, Fenny Marietza,
Sasmita Nabila Syahrir, I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi**

AKUNTANSI BERKELANJUTAN MENUJU MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK

**Hardianti Pertiwi
Renika Hasibuan
Ika Prayanthi
Annisa Nabila Hasan
Arnadi Chairunnas
Fenny Marietza
Sasmita Nabila Syahrir
I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi**



GET PRESS INDONESIA

AKUNTANSI BERKELANJUTAN MENUJU MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK

Penulis :

Hardianti Pertiwi
Renika Hasibuan
Ika Prayanthi
Annisa Nabila Hasan
Arnadi Chairunnas
Fenny Marietza
Sasmita Nabila Syahrir
I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi

ISBN : 978-623-125-018-6

Editor : Diana Purnama Sari. S.E M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Januari 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Akuntansi Berkelanjutan Menuju Masa Depan Yang Lebih Baik ini.

Buku ini membahas Pengenalan Akuntansi Berkelanjutan, Kerangka Kerja Pelaporan Berkelanjutan, Integrasi Akuntansi Keberlanjutan dalam Bisnis, Pengukuran Kinerja Lingkungan, Investasi Berkelanjutan, Inovasi Keberlanjutan, Pelaporan Keberlanjutan dan Transparansi, Aspek Etika dalam Akuntansi Berkelanjutan.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENGENALAN AKUNTANSI KEBERLANJUTAN..	1
1.1 Latar Belakang Akuntansi Keberlanjutan	1
1.2 Akuntansi Manajemen Lingkungan.....	7
1.3 Biaya Sosial dan Lingkungan.....	9
1.4 Laporan Biaya Lingkungan.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10
BAB 2 KERANGKA KERJA PELAPORAN	
BERKELANJUTAN.....	11
2.1 Pendahuluan	11
2.2 Pengungkapan Akuntansi Lingkungan	12
2.3 Kerangka Kerja Pengungkapan Akuntansi	
Lingkungan.....	18
DAFTAR PUSTAKA.....	24
BAB 3 INTEGRASI AKUNTANSI KEBERLANJUTAN	
DALAM BISNIS.....	25
3.1 Memahami Konsep dan Pentingnya Akuntansi	
Keberlanjutan dalam Bisnis	25
3.2 Tantangan Mengintegrasikan Akuntansi	
Berkelanjutan dalam Bisnis	28
3.3 Peluang Mengintegrasikan Akuntansi	
Berkelanjutan dalam Bisnis	30
3.4 Praktik Mengintegrasikan Akuntansi	
Berkelanjutan dalam Bisnis	31
3.5 Kesimpulan	38
DAFTAR PUSTAKA.....	41
BAB 5 PENGUKURAN KINERJA LINGKUNGAN	43
5.1 Definisi Kinerja Lingkungan	43
5.2 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	
Lingkungan: Aktivitas Pencegahan	44
5.2.1 Instrumen Pencegahan Pada Pengendalian	
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.....	44
5.2.2 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	

Lingkungan : Penanggulangan.....	46
5.2.3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	
Lingkungan : Pemulihan	47
5.3 Pemeliharaan Lingkungan Hidup	47
5.4 Pengukuran Kinerja Lingkungan Berdasarkan	
Pemenuhan Baku Mutu.....	48
5.4.1 Baku Mutu Emisi	48
5.4.2 Baku Mutu Limbah Cair	50
5.4.3 Baku Mutu Limbah B3	51
5.4.4 Baku Mutu Limbah Non-B3	52
5.4.5 Baku Mutu Kualitas Udara	53
5.4.6 Baku Mutu Kebisingan.....	54
5.5 Pengukuran Kinerja Lingkungan Berdasarkan	
PROPER	54
5.5.1 Kriteria Penilaian Ketaatan	55
5.5.2 Kriteria Beyond Compliance.....	55
5.5.3 Peringkat Dalam PROPER.....	56
5.6 Pengukuran Kinerja Lingkungan Berdasarkan	
Standar GRI.....	57
5.6.1 Aspek Material dan Pengukurannya	57
5.6.2 Aspek Energi dan Pengukurannya	58
5.6.3 Aspek Emisi dan Pengukurannya.....	59
5.6.4 Aspek Limbah dan Pengukurannya.....	59
5.6.5 Aspek Air dan Pengukurannya	60
5.6.6 Keanekaragaman Hayati.....	60
5.6.7 Penilaian Lingkungan Supplier	61
DAFTAR PUSTAKA	62
BAB 6 INVESTASI BERKELANJUTAN	63
6.1 Pendahuluan.....	63
6.2 Defenisi Investasi Berkelanjutan	63
6.3 Jenis Investasi Berkelanjutan	64
6.4 Fungsi Investasi Berkelanjutan	66
6.5 Strategi dalam Investasi Berkelanjutan.....	67
6.6 Investasi Berkelanjutan di Indonesia	69
6.7 Peluang dan Tantangan dalam Investasi	
Berkelanjutan	71
6.7.1 Peluang Investasi Berkelanjutan	71
6.7.2 Tantangan Investasi Berkelanjutan.....	72

DAFTAR PUSTAKA.....	74
BAB 7 INOVASI BERKELANJUTAN.....	75
7.1 Pendahuluan	75
7.2 Definisi Inovasi Berkelanjutan Dalam Akuntansi....	75
7.3 Tantangan Inovasi Berkelanjutan Saat Ini Dalam Akuntansi	76
7.4 Peran Inovasi Berkelanjutan Dalam Akuntansi.....	79
7.5 Praktik Terbaik Untuk Inovasi Berkelanjutan Dalam Akuntansi	81
7.6 Manfaat Inovasi Berkelanjutan Dalam Akuntansi ..	82
7.7 Tantangan dan Peluang di Masa Yang Akan Datang.....	83
7.8 Kesimpulan	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
BAB 8 PELAPORAN KEBERLANJUTAN DAN TRANSPARANSI	87
8.1 Pendahuluan	87
8.2 Definisi Pelaporan Berkelanjutan	88
8.3 Definisi Transparansi.....	88
8.4 Pelaporan Berkelanjutan Dan Transparansi.....	88
8.5 Tujuan Pelaporan Berkelanjutan Dan Transparansi.....	89
8.6 Akibat Tidak Adanya Laporan Berkelanjutan Dan Transparansi	91
8.7 Langkah-Langkah Membuat Laporan Berkelanjutan.....	92
8.8 Prinsip-Prinsip Pelaporan Berkelanjutan	93
8.9 Kategori Pengungkapan Pelaporan Berkelanjutan.	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
BAB 9 ASPEK ETIKA DALAM AKUNTANSI KEBERLANJUTAN.....	99
9.1 Pendahuluan	99
9.2 Legitimacy Theory.....	103
9.3 Etika Lingkungan	104
9.4 Etika Lingkungan dan Kinerja Ekonomi	106
9.5 Etika Bisnis	109
9.6 Etika Bisnis berbasis Akuntansi Lingkungan	110
9.7 Peran Etika dalam Bisnis Internasional	112

DAFTAR PUSTAKA 115

BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1. Baku Mutu Emisi.....	49
Gambar 5.2. Baku Mutu Air Limbah.....	50
Gambar 5.3. Baku Mutu Limbah B3.....	52
Gambar 5.4. Baku Mutu Limbah B3.....	52
Gambar 5.5. Baku Mutu Kualitas Udara	53
Gambar 5.6. Baku Mutu Kebisingan	54
Gambar 5.7. Rumus Material Input Daur Ulang	58
Gambar 5.8. Rumus produk dan kemasan <i>reclaimed</i>	58
Gambar 5.9. Rumus Konsumsi Energi.....	58

BAB 1

Pengenalan Akuntansi Keberlanjutan

Oleh Hardianti Pertiwi

1.1 Latar Belakang Akuntansi Keberlanjutan

(Lako, 2018; 66) bahwa Akuntansi keberlanjutan merupakan suatu hal pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, serta pengungkapan yang terintegrasi terhadap objek, transaksi, atau peristiwa keuangan, sosial, dan lingkungan pada proses suatu akuntansi untuk menghasilkan beberapa informasi akuntansi keuangan yang dibutuhkan, sosial dan lingkungan yang utuh, terpadu, serta relevan yang sangat bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan suatu keputusan pada pengelolaan ekonomi dan nonekonomi.

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat tiga unsur utama keberlanjutan. Setiap unsur tersebut mencakup hal-hal berikut:

Faktor Lingkungan	Sosial	Ekonomis
• Air • Berbahaya dan limbah non B3 • Energi • Gas-gas rumah kaca • Emisi • Mendaur Ulang • Pengemasan	• Kondisi kerja • Perbedaan • Investasi komunitas • Hak Asasi Manusia dan perdagangan yang adil • Kebijakan public • Keamanan • Anti korupsi	• Tata kelola perusahaan • Kinerja keuangan • Akuntabilitas/Transparansi • Nilai <i>Stakeholder</i> • Performa Ekonomi

Sejarah menunjukkan bahwa dunia usaha berkembang pesat sejak Revolusi Industri. Namun, kemajuan dalam industri dan ekonomi ini juga berdampak negatif pada lingkungan. Isu kerusakan lingkungan yang dianggap sebagai hasil dari eksploitasi industri atas sumber daya alam mulai muncul.

Selama krisis energi 1970-an, bidang akuntansi mulai mendapat perhatian. Pada tahun 1980-an Krisis energi berakhir dan membuka era baru dalam kemakmuran ekonomi, meskipun masalah tersebut hanya dipertimbangkan untuk sementara waktu. Sebelum standar untuk mengukur dampak ekonomi dibuat, praktik akuntansi keberlanjutan telah merosot. Peraturan dan persetujuan telah dicapai mengenai cara menghitung faktor lingkungan-sosial dan faktor lain yang sulit dihitung.

Tahun 1990-an, ada peningkatan besar pada aktivitas perlindungan lingkungan yang membuat akuntansi lingkungan lebih dikenal oleh konsumen dan bisnis. Seiring waktu, standar pada akuntansi untuk lingkungan hidup telah ditetapkan di beberapa organisasi akuntansi yang terkemuka, yaitu Komite Eksekutif Standar Akuntansi *American Institute of CPA* dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Terdapat enam alasan utama untuk menggunakan akuntansi keberlanjutan, yaitu:

1. *Greenwashing*
2. Mimikri dan tekanan industry
3. Tekanan legislative
4. Tekanan oleh pemangku kepentingan dan memastikan "lisensi untuk beroperasi"
5. Pengaturan secara mandiri, tanggung jawab pada perusahaan dan alasan yang beretika
6. Mengelola kasus pada bisnis untuk keberlanjutan

Ada juga beberapa komponen akuntansi keberlanjutan, seperti:

1. Identifikasi pengakuan pada pengaruh yang negatif dalam aktivitas pada bisnis perusahaan tersebut terhadap lingkungan pada praktik konvensional akuntansi.
2. Mencari, mengidentifikasi, dan memeriksa persoalan dalam bidang akuntansi konvensional yang telah bertentangan

dengan beberapa kriteria sosial dan lingkungan, serta memberikan solusi.

3. Melakukan beberapa langkah yang proaktif untuk menyusun inisiatif dalam memperbaiki lingkungan pada praktik konvensional akuntansi.
4. Mengembangkan format yang baru pada sistem dalam akuntansi keuangan dan non-keuangan, serta sistem pada pengendalian terhadap pendukung setiap keputusan manajemen yang ramah lingkungan.
5. Mengidentifikasi pendapatan dan beberapa biaya apabila suatu perusahaan lebih peduli terhadap sosial dan lingkungan dari berbagai sistem perbaikan lingkungan.
6. Mengembangkan penilaian, pelaporan internal dan eksternal, serta format kerja pada perusahaan.

Sebagai bagian dari paket pelaporan akuntansi, informasi akuntansi keuangan (ekonomi), sosial, lingkungan, dan akuntansi digabungkan sehingga pemangku kepentingan dapat menggunakannya untuk menilai dan membuat keputusan tentang investasi ekonomi, manajemen, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar para pengguna, yang terdiri dari pemegang saham, manajemen, kreditur, pelanggan, pegawai, masyarakat umum, serta pemerintah dapat melihat dan menilai secara menyeluruh kinerja dan posisi keuangan pada perusahaan, risikonya, prospek dalam pertumbuhan bisnis, dan kinerja labanya, serta keberlanjutannya sebelum membuat keputusan dalam bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Dalam mengelola bisnis harus bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, pemangku kepentingan dapat sepenuhnya memahami informasi akuntansi tentang kualitas manajemen. Ini adalah komponen penting yang menentukan apakah pertumbuhan dan keuntungan perusahaan akan bertahan dalam jangka panjang.

Namun, masih ada beberapa tantangan besar yang menghalangi penggabungan keberlanjutan ke dalam proses organisasi. Akuntansi keberlanjutan menghadapi beberapa masalah. Yang pertama adalah tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai apa yang dimaksud dengan "pembangunan berkelanjutan". Definisi "Pembangunan yang berkelanjutan"

menurut *Brundland Report* bahwa “konstruksi yang dapat memenuhi setiap kebutuhan saat ini sambil mempertahankan kemampuan generasi berikutnya agar dapat memenuhi semua kebutuhan mereka sendiri” Dalam implementasinya pembangunan berkelanjutan ini dimanifestasikan oleh 17 item *Sustainability Development Goals* (SDGs).



Sumber: <https://www.thegef.org/topics/safeguarding-global-commons>

Terlepas dari kenyataan bahwa ini dianggap sebagai kendala dalam menerapkan akuntansi keberlanjutan untuk organisasi. Namun, SDG dapat dihubungkan ke dalam strategi organisasi melalui berbagai framework dan model, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Nama Framework/Model/Standar	Badan Penerbit
1. SDG Compass (2015)	The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), The UN Global Compact (UNGC) dan GRI
2. <IR> Framework Five-step approach (dalam dokumen : The Sustainable Development Goals, Integrated Thinking and the Integrated Report)	Carol Adams yang mengembangkan model dari framework IIRC (International Integrated Reporting Council)
3. GRI UNGC Business Reporting on SDGs (2017)	GRI (General Reporting Initiatives) dan UNGC (United Nation Global Compact)
4. UCTAD ISAR Core Indicators	United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Reporting and Accounting (ISAR)

Sumber: ACCA, 2017

SDG akan menjadi lebih mudah bagi perusahaan untuk memasukkannya ke dalam strategi mereka melalui berbagai struktur yang tercantum pada tabel di atas. Jika pada perusahaan berkomitmen telah memprioritaskan target SDG tertentu yang akan dicapai perusahaan tersebut, namun ada beberapa SAK yang bisa digunakan, serta menjadi pusat perhatian perusahaan yang memasukkan SDG ke dalam laporan keuangan (Triwahyuni, 2018), yaitu:

1. Pencadangan Biaya Lingkungan dan PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi
Untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi perusahaan dapat dilakukan secara lestari, SDG mengutamakan kepedulian perusahaan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

2. Perubahan Teknologi secara Cepat dan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset

Perusahaan yang ingin tetap berkelanjutan harus segera beradaptasi dengan teknologi karena SDA yang sangat terbatas, serta teknologi yang maju pesat. Perusahaan wajib untuk mempertimbangkan penggunaan PSAK 48 saat menilai penurunan nilai aset mereka karena kemajuan teknologi dapat menyebabkan aset menjadi usang lebih cepat.

3. Pengungkapan Manajemen Risiko dalam PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Misalkan Anda merupakan salah satu bank yang sebagian besar klien Anda adalah perusahaan agrikultur. Jika suhu Bumi naik dua derajat saja, itu dapat berdampak besar pada bisnis klien di masa yang akan datang. Kerusakan pada lingkungan, serta pemanasan global berpotensi meningkatkan suhu di dalam Bumi. Peningkatan pada suhu tersebut dapat menyebabkan kekeringan atau kegersangan di beberapa negara tempat klien bekerja, yang menambah biaya mereka. Selain itu, peningkatan pada suhu dapat menyebabkan semua es di kutub dapat mencair, menyebabkan permukaan air laut dapat meningkat dan terjadi banjir di beberapa kota tertentu. Perusahaan, baik pembiayaan maupun agrikultur, harus mempertimbangkan semua perubahan iklim ini sebagai risiko bisnis. Perusahaan harus mengelola dan mengungkapkan risiko lingkungan dengan baik, terutama yang berkaitan pada instrumen keuangan.

4. Memperhitungkan Risiko pada Lingkungan dalam Model Penurunan Nilai PSAK 71 Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan yang bersifat jangka panjang, seperti pinjaman jangka panjang, serta pemberi pinjaman harus mempertimbangkan potensi bahaya lingkungan. Asumsi lain yang berkaitan dengan risiko lingkungan, seperti peningkatan curah hujan dan risiko gempa bumi, yang muncul dalam kasus sebelumnya di mana suhu bumi meningkat beberapa derajat.

5. Kesetaraan Gender dan PSAK 24 Imbalan Kerja

Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan SDG. Semua karyawan perusahaan harus memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam sebuah Riset Bank Dunia bahwa kesenjangan pada upah antara buruh laki-laki dan perempuan masih sangat tinggi (World Bank, 2015), terutama bagi buruh perempuan yang tingkat pendidikan rendah. Dalam hal imbalan kerja perusahaan, menyetarakan upah pekerja laki-laki dan perempuan berdampak langsung pada beban kerja. Kesetaraan gender mencakup bukan

- hanya masalah upah laki-laki yang setara dengan perempuan, tetapi juga memberikan manfaat yang setara bagi pekerja perempuan, seperti cuti melahirkan. Karyawan laki-laki tidak memiliki hak cuti melahirkan tiga bulan yang dimiliki perempuan. Hal tersebut sering dikritik karena laki-laki yang telah berkeluarga juga mengalami efek kehadiran bayi baru di keluarganya, seperti kurang tidur dan kelelahan. Selain itu, banyak perusahaan memberikan hak cuti kepada karyawan laki-laki baru yang memiliki anak. Jumlah kompensasi kerja yang dibayarkan perusahaan pasti akan dipengaruhi oleh peningkatan kompensasi cuti ini.
6. Beban Pengembangan Riset dan PSAK 19 Aset Tak Berwujud *Sustainable Development Goals* (SDGs) tidak hanya menimbulkan biaya tambahan yang wajib ditanggung; mereka juga membuka beberapa peluang bisnis baru, seperti energi yang terbarukan, bisnis yang berbasis platform yang memotong rantai nilai konvensional, atau produk agrikultur yang premium, seperti bahan makanan organik. Produk yang disertifikasi ramah lingkungan dan produk yang lebih hemat energi diperlukan oleh masyarakat global yang semakin peduli dengan lingkungan. Kegiatan riset dan pengembangan dapat digunakan oleh dunia bisnis untuk memenuhi kebutuhan ini. Perusahaan harus mempertimbangkan SDGs saat membuat produk baru. Misalnya, membuat kemasan produk yang tidak menggunakan plastik dan ramah lingkungan. Perusahaan menggunakan pengembangan dan riset sebagai ujung tombak dalam menciptakan inovasi dan bisnis yang berkelanjutan.

1.2 Akuntansi Manajemen Lingkungan

Setiap produk perusahaan mengandung biaya. Perusahaan membuat dua jenis produk: produk berwujud dan produk tidak berwujud. Produk tidak berwujud juga disebut sebagai jasa, dan mereka dibuat dengan bahan, tenaga kerja, dan sumber daya modal.

Tujuan utama akuntansi manajemen lingkungan adalah untuk menghitung biaya lingkungan. Tujuan lainnya, yaitu:

1. Memonitor dan mengevaluasi informasi terukur dari sisi keuangan, serta unsur manajerial.
2. Memonitor arus setiap data, energi dan bahan yang saling memiliki hubungan timbal balik untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan setiap bahan dan energi
3. Meminimalisir dampak pada lingkungan dari operasional perusahaan, beberapa produk maupun jasa
4. Mengurangi beberapa risiko pada lingkungan
5. Meningkatkan kinerja manajemen perusahaan.

Akuntansi manajemen lingkungan memiliki data yang diproses untuk memberikan informasi kepada para pihak yang berkepentingan, seperti akuntansi keuangan dan manajemen konvensional. Beberapa informasi pada akuntansi manajemen lingkungan terdiri dari:

1. Informasi fisik

Data yang akurat pada jumlah dan tujuan dari seluruh air, energi dan materi yang digunakan dalam mendukung seluruh aktivitas. Kebutuhan untuk mengetahui yang mana, serta berapa banyak energi, air dan materi yang dibawa masuk, yang menjadi produk fisik dan menjadi emisi dan limbah.

2. Informasi moneter

Data berkaitan dengan nilai moneter dari biaya yang telah dikeluarkan dalam aktivitas berkaitan dengan pertanggungjawaban lingkungan, kerusakan, dan pencegahan dampak lingkungan dan sosial.

Apabila menerapkan akuntansi manajemen lingkungan, organisasi akan memperoleh keuntungan, antara lain:

1. Dapat membantu dalam setiap pengambilan keputusan
2. meningkatkan performa pada ekonomi dan lingkungan usaha
3. akan mampu memuaskan semua pihak yang terkait
4. dalam usaha secara simultan dapat meningkatkan performa pada sisi lingkungan maupun ekonomi.

1.3 Biaya Sosial dan Lingkungan

Biaya sosial dan lingkungan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengurangi maupun mengembalikan kondisi lingkungan dan sosial pada perusahaan ke kondisi yang normal, sebagai hasil dari kegiatan perusahaan. Biaya lingkungan bisa didefinisikan sebagai biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk. Sehingga, biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan (Hansen dan Mowen, 2007).

Biaya lingkungan disebut juga sebagai biaya kualitas lingkungan total (*Environmental Quality Cost*). Pada model kualitas lingkungan total, keadaan yang ideal dimana tidak ada kerusakan lingkungan (sama dengan cacat nol pada manajemen kualitas total). Kerusakan didefinisikan sebagai degradasi langsung dari lingkungan, seperti emisi residu benda padat, cair, atau gas kedalam lingkungan (misalnya pencemaran air dan pencemaran udara), atau degradasi tidak langsung seperti penggunaan bahan baku dan energi yang tidak perlu (Hansen dan Mowen, 2007).

1.4 Laporan Biaya Lingkungan

Laporan biaya lingkungan yang baik adalah laporan yang memberikan perincian biaya lingkungan yang jelas dan memberikan dua hasil, yaitu:

1. Dampak biaya pada lingkungan terhadap profitabilitas pada perusahaan
2. Banyaknya relatif yang dapat dihabiskan untuk setiap kategori.

DAFTAR PUSTAKA

- Hansen, Don dan Maryanne M. Mowen. 2007. Managerial Accounting. Eight Edition. Thomson South-Western
- Ihsani Mazelfi. 2018. Analisis Perbedaan Pengungkapan Aspek Sebelum dan Setelah Penerapan Prinsip Materialitas pada Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Studi pada Perusahaan Gas Negara). Accounting and Business Information Systems Journal. Vol 6, No 2 (2018)
- Lako, Andreas. "Akuntansi Hijau, Isu, Teori, dan Aplikasi." Jakarta: Salemba Empat. 2018.
- Poerwanto. 2010. Corporate Social Responsibility. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sudana, I Made. (2011). Manajemen Keuangan Perusahaan Teori & Praktik. Erlangga. Jakarta.
- Triwahyuni, Erska. 2018. Dampak SDGs dalam Laporan Keuangan dan Peran Penting Akuntan. Tulisan ini dimuat dalam Majalah Akuntan Indonesia edisi Juni 2018 halaman 24-26.

BAB 2

KERANGKA KERJA PELAPORAN BERKELANJUTAN

Oleh Renika Hasibuan

2.1 Pendahuluan

Di era digital sekarang ini, persaingan perusahaan sangat kompetitif. Dengan perkembangan dunia usaha memberikan dampak positif yaitu dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring perkembangan dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan di setiap negara, maka tingkat kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial menjadi masalah yang cukup serius. Kegiatan ekonomi pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari alam yakni memerlukan input dari alam, baik untuk bahan baku, sumber energi, air, udara maupun jasa lingkungan lainnya seperti pemandangan alam yang sangat penting bagi industri tertentu, misalnya pariwisata. Semua input dari alam ini dikombinasikan dengan input lainnya seperti tenaga kerja dan modal menghasilkan output untuk dikonsumsi oleh manusia.

Kegiatan produksi sangat terkait dengan lingkungan alam dimana semua sumber daya untuk diolah menjadi produk atau jasa yang dibutuhkan manusia didapatkan dari alam. Pengambilan sumber daya yang berlebihan dari alam akan meningkatkan kelangkaan dan akhirnya akan mengancam keberlanjutan pemanfaatan sumber daya tersebut. Di lain pihak, alam juga menjadi tempat untuk membuang sisa aktifitas produksi dan konsumsi yang kebanyakan bersifat merusak alam. Dampaknya dapat mengurangi kesejahteraan manusia dan dapat mengurangi kemampuan alam untuk memberikan hasil alam terbaiknya (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Kegiatan ekonomi pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari alam yakni memerlukan input dari alam, baik

untuk bahan baku, sumber energi, air, udara maupun jasa lingkungan lainnya seperti pemandangan alam yang sangat penting bagi industri tertentu, misalnya pariwisata. Kerusakan lingkungan merupakan permasalahan yang cukup serius seiring dengan tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan di setiap negara. Salah satu penyebab dari kerusakan lingkungan adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar. Selain itu, kegiatan produksi perusahaan juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang akan berdampak terhadap konflik sosial. Perusahaan harus lebih memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan agar dapat memperoleh legitimasi atas peran sosial dan kepedulian lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan, sehingga perusahaan akan mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Implementasi akuntansi keberlanjutan oleh banyak perusahaan besar, termasuk dalam industri manufaktur, dagang, dan jasa, merupakan tindakan strategis untuk memahami dan mengelola dampak lingkungan dari kegiatan operasional. Penilaian dari sudut pandang biaya dan manfaat atau efek kegiatan terhadap keberlanjutan operasional perusahaan menjadi kunci dalam memastikan bahwa perusahaan dapat menjadi "*going concern*" atau berkelanjutan dalam jangka panjang.

2.2 Pengungkapan Akuntansi Lingkungan

Pengungkapan akuntansi lingkungan merupakan proses menyampaikan informasi terkait dampak dan kinerja lingkungan suatu organisasi melalui laporan keuangan dan laporan lainnya. Pengungkapan ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana perusahaan mengelola isu-isu lingkungan, mematuhi regulasi, dan berkontribusi pada keberlanjutan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pengungkapan akuntansi lingkungan:

1. Tujuan Pengungkapan Akuntansi Lingkungan

Adapun tujuan pengungkapan akuntansi lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. **Transparansi dan Akuntabilitas**
 - 1) Memberikan transparansi mengenai dampak lingkungan perusahaan.
 - 2) Menyediakan informasi yang transparan dan terukur mengenai kinerja perusahaan dalam tiga pilar keberlanjutan: ekonomi, lingkungan, dan sosial.
 - 3) Meningkatkan akuntabilitas perusahaan terhadap pemangku kepentingan.
- b. **Pengambilan Keputusan**

Memberikan pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan karyawan, data yang relevan untuk membuat keputusan yang informasional dan berkelanjutan.
- c. **Peningkatan Kinerja Berkelanjutan**

Menetapkan dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan dalam praktik berkelanjutan.
- d. **Kemitraan dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan**

Membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan dengan berbagi informasi yang jelas dan terperinci.
- e. **Kepatuhan Regulasi**

Menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan standar lingkungan.
- f. **Manajemen Risiko**
 - 1) Mengidentifikasi dan mengungkapkan risiko lingkungan yang dihadapi perusahaan.
 - 2) Menjelaskan strategi pengelolaan risiko lingkungan.
- g. **Promosi Praktik Berkelanjutan**
 - 1) Memberikan informasi tentang inisiatif berkelanjutan dan praktik bisnis yang ramah lingkungan.
 - 2) Mendorong adopsi praktik-praktik terbaik dalam industri.

h. Pembandingan dan Diferensiasi

- 1) Memungkinkan perusahaan untuk membandingkan kinerja berkelanjutan mereka dengan industri sejenis.
- 2) Meningkatkan diferensiasi dari pesaing dengan menunjukkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan.

2. Elemen Pengungkapan Akuntansi Lingkungan

Pengungkapan adalah sesuatu yang diketahui untuk diungkapkan. Dalam kasus akuntansi, pengungkapan dilihat sebagai alat motivasi yang digunakan untuk mensimulasikan tindakan oleh orang-orang tertentu yang disebut sebagai pembuat keputusan. Istilah pengungkapan dalam akuntansi mengacu pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Penyajian dan pengungkapan merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Pengungkapan memiliki arti menyediakan informasi dalam laporan keuangan yang meliputi laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan (Suwardjono, 2014).

Adapun elemen pengungkapan akuntansi lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Pengungkapan Ekonomi

Pengungkapan ekonomi dalam akuntansi berkelanjutan mencakup penyajian informasi terkait kinerja keuangan dan aspek ekonomi lainnya yang relevan dengan dimensi keberlanjutan. Tujuan dari pengungkapan ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana perusahaan mengelola aspek ekonomi dari operasinya dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan jangka panjang.

Pengungkapan ekonomi meliputi :

- 1) Catatan Atas Laporan Keuangan
 - a) Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang kewajiban atau biaya lingkungan yang mungkin mempengaruhi

keberlanjutan operasional. Pengungkapan tentang kewajiban yang mungkin timbul akibat dampak lingkungan, termasuk rehabilitasi lahan atau tanggung jawab lingkungan jangka panjang.

- b) **Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan**
Pengungkapan tanggungjawab terhadap lingkungan memberikan informasi mengenai tanggung jawab hukum dan finansial perusahaan terkait dampak lingkungan. Dalam hal ini yaitu adanya biaya Lingkungan Langsung dan Tidak Langsung, sehingga dibutuhkan informasi detail biaya operasional dan investasi yang terkait langsung dan tidak langsung dengan dampak lingkungan.

2) **Pendapatan dan Biaya Berkelanjutan**

- a) **Pendapatan Berkelanjutan**
Pendapatan berkelanjutan merupakan informasi mengenai pendapatan dari produk atau layanan berkelanjutan.
- b) **Biaya dan Penghematan Berkelanjutan**
Pengungkapan biaya dan penghematan yang berhubungan dengan praktik berkelanjutan yaitu seperti investasi dalam teknologi hijau.

b. Pengungkapan Lingkungan

Pengungkapan lingkungan dalam akuntansi berkelanjutan melibatkan penyajian informasi terperinci tentang dampak dan kinerja lingkungan suatu organisasi. Tujuan dari pengungkapan ini adalah memberikan transparansi dan akuntabilitas terkait dengan praktik-praktik dan inisiatif lingkungan yang diadopsi oleh perusahaan. Dengan cara ini, pemangku kepentingan, seperti investor, konsumen, dan masyarakat umum, dapat memahami sejauh mana perusahaan memahami dan mengelola dampaknya terhadap lingkungan.

c. Pengungkapan Sosial

Pengungkapan sosial dalam akuntansi berkelanjutan mencakup penyajian informasi terperinci mengenai dampak dan kinerja sosial suatu organisasi. Tujuan dari pengungkapan ini adalah memberikan transparansi dan akuntabilitas terkait dengan praktik-praktik sosial dan kemanusiaan yang diadopsi oleh perusahaan. Informasi ini tidak hanya mencakup hubungan perusahaan dengan karyawan, tetapi juga dengan masyarakat umum dan komunitas tempat perusahaan beroperasi

d. Pengungkapan Inovasi dan R&D (Inovasi)

Pengungkapan inovasi dan penelitian dan pengembangan (R&D) dalam akuntansi berkelanjutan melibatkan penyajian informasi terkait upaya perusahaan dalam menciptakan solusi baru, teknologi hijau, dan berbagai inovasi untuk mendukung tujuan keberlanjutan. Pengungkapan ini memberikan pemahaman tentang bagaimana perusahaan memanfaatkan R&D dan inovasi untuk mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan produk atau layanan yang lebih berkelanjutan.

3. Laporan Berkelanjutan atau Keberlanjutan

Laporan keberlanjutan, juga dikenal sebagai laporan berkelanjutan atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), adalah dokumen yang disusun oleh suatu organisasi untuk menyampaikan informasi terkait dengan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Laporan ini bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kontribusi positif perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta bagaimana perusahaan mengelola risiko dan tantangan keberlanjutan.

Laporan berkelanjutan adalah bentuk laporan yang menyajikan informasi terperinci mengenai kinerja suatu organisasi dalam hal ekonomi, lingkungan, dan sosial. Laporan ini mencakup berbagai aspek, termasuk dampak ekonomi perusahaan, praktik-praktik berkelanjutan yang

diadopsi, dan kontribusi sosialnya. Tujuan utama laporan berkelanjutan adalah memberikan pemahaman yang holistik tentang bagaimana perusahaan memandang dan mengelola dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Berikut adalah beberapa elemen umum yang biasanya disertakan dalam laporan keberlanjutan yaitu :

- a. Ringkasan Eksekutif : Gambaran singkat tentang tujuan dan hasil utama yang dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu.
- b. Profil Perusahaan : Sejarah singkat perusahaan, Visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.
- c. Pemangku Kepentingan dan Keterlibatan: Daftar pemangku kepentingan utama Perusahaan dan strategi keterlibatan dan dialog dengan pemangku kepentingan.
- d. Kinerja Ekonomi: Informasi keuangan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas serta analisis tren keuangan dan rasio kinerja.
- e. Kinerja Sosial: Kesejahteraan karyawan, keamanan kerja, dan program pelatihan serta diversitas dan inklusi juga keterlibatan dalam masyarakat dan inisiatif tanggung jawab sosial.
- f. Kinerja Lingkungan: Emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan lainnya serta pengelolaan limbah dan program daur ulang juga penggunaan sumber daya alam dan efisiensi energi.
- g. Inovasi dan R&D:
Investasi dalam inovasi dan penelitian dan pengembangan serta pengembangan produk atau layanan berkelanjutan dan Paten dan hak kekayaan intelektual.
- h. Pengungkapan Akuntansi Lingkungan:
Pengungkapan terkait biaya dan manfaat ekonomi dari praktik-praktik berkelanjutan serta identifikasi risiko lingkungan dan tindakan pengurangan risiko.
- i. Tujuan dan Rencana Masa Depan: tujuan berkelanjutan yang ingin dicapai oleh Perusahaan dan rencana strategis dan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan.

- j. Sistem Manajemen Keberlanjutan: pengungkapan tentang sistem dan kebijakan manajemen keberlanjutan yang diterapkan serta sertifikasi atau pengakuan dari standar keberlanjutan tertentu.
- k. Penghargaan dan Pengakuan: penghargaan atau pengakuan yang diterima perusahaan terkait dengan keberlanjutan serta keterlibatan dalam inisiatif atau program berkelanjutan global atau industri.
- l. Pelaporan Keuangan Terintegrasi: Integrasi informasi keberlanjutan dalam laporan keuangan utama Perusahaan dan menunjukkan bagaimana kinerja keberlanjutan terkait dengan kinerja keuangan.
- m. Verifikasi dan Validasi: Informasi mengenai proses verifikasi atau validasi laporan keberlanjutan oleh pihak eksternal atau pihak ketiga dan Menciptakan tingkat kepercayaan dan akuntabilitas lebih lanjut.
- n. Indeks GRI atau SASB: Jika perusahaan mengadopsi pedoman seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) atau *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), laporan sering mencakup indeks referensi yang menyajikan poin-poin data sesuai dengan pedoman tersebut.

2.3 Kerangka Kerja Pengungkapan Akuntansi Lingkungan

Berbagai pedoman dan standar telah dikembangkan untuk membimbing perusahaan dalam menyusun laporan berkelanjutan yaitu *Global Reporting Initiative (GRI)*, yang menyediakan kerangka kerja global untuk pelaporan berkelanjutan, dan *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*, yang fokus pada pengungkapan berkelanjutan yang relevan dengan keuangan.

Berbagai pedoman dan standar telah dikembangkan untuk membimbing perusahaan dalam menyusun laporan berkelanjutan yaitu :

1. **Global Reporting Initiative (GRI)**

Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah organisasi independen yang menyediakan pedoman dan standar untuk pelaporan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. GRI didirikan pada tahun 1997 dan telah berkembang menjadi satu dari kerangka kerja paling diakui dan digunakan di dunia untuk pelaporan keberlanjutan. Pengungkapan akuntansi lingkungan menggunakan pedoman GRI sebagai kerangka kerja untuk pengungkapan yaitu untuk menyajikan informasi sesuai dengan standar dan indikator GRI untuk pengungkapan akuntansi lingkungan dan sosial.

a. Tujuan *Global Reporting Initiative (GRI)*

Adapun tujuan *Global Reporting Initiative (GRI)* adalah :

- 1) Meningkatkan Transparansi dengan memberikan pedoman untuk menyusun laporan yang transparan dan mudah dimengerti terkait dengan aspek-aspek keberlanjutan suatu organisasi.
- 2) Memotivasi Perusahaan dengan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan mereka dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
- 3) Memberikan Kerangka Kerja yang Konsisten yaitu dengan menyediakan kerangka kerja konsisten yang dapat diterapkan oleh berbagai jenis organisasi di seluruh dunia.

b. Pedoman *Global Reporting Initiative (GRI)*

Pedoman GRI terdiri dari serangkaian prinsip dan indikator yang dirancang untuk membantu perusahaan mengungkapkan dampak mereka terhadap tiga pilar keberlanjutan: ekonomi, lingkungan, dan sosial. Beberapa elemen kunci dalam pedoman GRI termasuk:

- 1) Prinsip GRI
 - a) Sesuai (*Materiality*)
Fokus pada isu-isu yang materi untuk perusahaan dan pemangku kepentingan.
 - b) Komprehensif (*Comprehensiveness*)

Menyajikan informasi yang mencakup aspek keberlanjutan yang signifikan.

c) Netral (*Neutrality*)

Memberikan informasi yang objektif dan netral.

d) Keandalan (*Sustainability Context*)

Menempatkan kinerja dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas

2) Indikator GRI

GRI memiliki sejumlah indikator kinerja yang mencakup sektor ekonomi, lingkungan, dan sosial. Contohnya termasuk emisi gas rumah kaca, penggunaan energi terbarukan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan sebagainya.

3) Siklus Laporan

GRI memberikan panduan tentang tahapan penyusunan laporan, dari persiapan hingga pemantauan dan penilaian.

4) Indeks GRI

Organisasi yang menggunakan pedoman GRI sering kali menyertakan "GRI Content Index" untuk membantu pemangku kepentingan menemukan informasi yang relevan di dalam laporan mereka.

c. Penerapan GRI

Penerapan GRI tidak bersifat wajib, tetapi banyak perusahaan di seluruh dunia yang memilih untuk mengadopsi kerangka kerja ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka dalam mengelola dampak keberlanjutan mereka.

d. Manfaat Penerapan GRI

1) Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan transparansi perusahaan dan memastikan akuntabilitas terkait dengan isu-isu keberlanjutan.

2) Perbandingan dan Evaluasi

Perbandingan dan evaluasi memungkinkan perusahaan untuk membandingkan kinerja

keberlanjutan mereka dengan perusahaan sejenis dan mengevaluasi perubahan kinerja dari waktu ke waktu.

3) Peningkatan Reputasi

Menerapkan pedoman GRI dapat meningkatkan reputasi perusahaan dengan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4) Akses ke Modal dan Investasi

Akses ke modal dan investasi dapat meningkatkan akses perusahaan terhadap modal dan investasi dari investor yang memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan.

GRI secara berkala mengembangkan dan memperbarui pedoman mereka untuk tetap relevan dengan perkembangan dalam praktik keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan GRI disarankan untuk mengacu pada versi terbaru pedoman tersebut.

2. *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*

Menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh investor dalam membuat keputusan berkelanjutan. Dengan laporan berkelanjutan, perusahaan dapat mengkomunikasikan komitmen mereka terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Mengintegrasikan standar SASB yang relevan dengan industri perusahaan dengan memperhatikan standar SASB yang relevan dengan industri perusahaan untuk pengungkapan keuangan dan berkelanjutan. Dengan memasukkan elemen-elemen ini dalam laporan, perusahaan dapat menyajikan gambaran yang komprehensif dan transparan mengenai dampak dan praktik keberlanjutan mereka. Ini membantu pemangku kepentingan dalam membuat keputusan dan memahami komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pedoman *SASB* mencakup sektor-sektor industri tertentu dan memfokuskan pada isu-isu yang paling material dan signifikan untuk setiap sektor. Berbeda dengan *GRI* yang bersifat umum, *SASB* lebih berorientasi industri dan bertujuan memberikan indikator keberlanjutan yang terukur dan terkait langsung dengan performa keuangan perusahaan.

Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam pedoman *SASB*:

- a. **Materialitas Industri-Spesifik**
SASB menyusun standar yang berfokus pada isu-isu yang paling material untuk sektor industri tertentu.
- b. **Keberlanjutan yang Terintegrasi**
Hubungan dengan Kinerja Keuangan yaitu menjembatani hubungan antara kinerja keberlanjutan dan kinerja keuangan.
- c. **Indikator Kinerja Keberlanjutan**
Metrics dan Indicators yaitu menyediakan metrics dan indikator yang spesifik dan terukur untuk mengevaluasi kinerja keberlanjutan.
- d. **Risiko dan Peluang**
Identifikasi Risiko dan Peluang yaitu membantu perusahaan mengidentifikasi risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.
- e. ***Stakeholder Engagement***
Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Mengakui pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pelaporan.
- f. **Standar untuk Pelaporan Keberlanjutan**
Kesesuaian dengan Standar Pelaporan Lainnya: Berupaya untuk menciptakan konsistensi dengan standar pelaporan keberlanjutan lainnya, seperti *GRI*.

Penerapan *SASB*:

SASB tidak menggantikan laporan keberlanjutan perusahaan atau standar keuangan yang sudah ada, tetapi lebih sebagai pelengkap. Perusahaan dapat menggunakan

standar SASB sebagai panduan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi keberlanjutan yang material sesuai dengan konteks sektoral mereka.

Manfaat Penerapan SASB

Manfaat penerapan *SASB* adalah :

- a. Relevansi untuk Investor
Memastikan bahwa informasi yang dilaporkan berhubungan langsung dengan performa keuangan dan relevan bagi investor.
- b. Dukungan Keputusan Investasi
Memberikan investor informasi yang lebih terinci dan spesifik untuk mendukung pengambilan keputusan investasi berkelanjutan.
- c. Konsistensi dalam Pelaporan
Memberikan konsistensi dalam pengungkapan keberlanjutan antar perusahaan di sektor yang sama.
- d. Peningkatan Akuntabilitas
Mendorong perusahaan untuk lebih akuntabel dalam mengelola risiko dan peluang berkelanjutan.
- e. Meningkatkan Pemahaman Pemangku Kepentingan
Memberikan pemangku kepentingan, termasuk investor, panduan yang lebih jelas tentang bagaimana perusahaan mengelola aspek keberlanjutan mereka.

Meskipun SASB telah menjadi salah satu pemimpin dalam mengembangkan standar keberlanjutan yang terkait dengan keuangan, seperti setiap inisiatif, ada pandangan yang berbeda-beda. Beberapa mendukung pendekatan spesifik terhadap sektor industri, sementara yang lain menekankan pentingnya kerangka kerja yang bersifat umum dan dapat diterapkan di berbagai sektor. Pilihan antara menggunakan GRI atau SASB (atau keduanya) seringkali tergantung pada kebutuhan dan tujuan spesifik dari perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Mazelfi, Ihsani. 2018. Analisis Perbedaan Pengungkapan Aspek Sebelum dan Setelah Penerapan Prinsip Materialitas pada Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Studi pada Perusahaan Gas Negara). *Accounting and Business Information Systems Journal*. Vol 6, No 2 (2018)
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014a. *Buku Pedoman Energi Bersih Untuk Lembaga Jasa keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014b. *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Di Indonesia*.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. *Tata Kelola Aspek Resiko Sosial dan Lingkungan*.

BAB 3

INTEGRASI AKUNTANSI

KEBERLANJUTAN DALAM BISNIS

Oleh Ika Prayanthi

3.1 Memahami Konsep dan Pentingnya Akuntansi Keberlanjutan dalam Bisnis

Akuntansi keberlanjutan mengacu pada praktik mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam pelaporan keuangan dan proses pengambilan keputusan. Ketika bisnis semakin menyadari pentingnya pembangunan berkelanjutan, integrasi akuntansi keberlanjutan telah menjadi alat penting untuk mengukur dan mengelola dampak lingkungan dan sosial. Proses penilaian, evaluasi, dan pengungkapan dampak sosial dan lingkungan bisnis dikenal sebagai akuntansi keberlanjutan. Akuntansi keberlanjutan menghubungkan strategi organisasi dari kerangka kerja yang berkelanjutan dengan mengungkapkan data pada tingkat tiga dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Karena apa yang diukur akan dikelola, akuntansi keberlanjutan dapat membantu bisnis beroperasi secara berbeda. Kebijakan bisnis yang kuat dan ditegakkan secara kuantitatif diperlukan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan, begitu pula akuntan dengan pelatihan yang diperlukan untuk mengukur keberlanjutan secara tepat dan menyeluruh.

Akuntansi keberlanjutan adalah subkategori akuntansi keuangan yang berfokus pada pengungkapan informasi non-keuangan tentang kinerja perusahaan kepada pemangku kepentingan eksternal, seperti pemegang modal, kreditor, dan otoritas lainnya. Konsep akuntansi keberlanjutan telah muncul dari perkembangan akuntansi dan mewakili kegiatan yang memiliki dampak langsung pada masyarakat, lingkungan, dan kinerja ekonomi suatu organisasi (Schaltegger and Burritt,

2010). Pentingnya akuntansi keberlanjutan dalam bisnis dapat dipahami melalui hal-hal penting berikut ini:

1. Peningkatan Manajemen Risiko: Pelaporan keberlanjutan meningkatkan strategi manajemen risiko, memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang terkait dengan dampak sosial dan lingkungan.
2. Optimalisasi dan Penghematan Biaya: Ini membantu dalam mengoptimalkan biaya dan penghematan dengan mengidentifikasi area untuk peningkatan manajemen sumber daya dan efisiensi operasional.
3. Merampingkan Proses Pengambilan Keputusan: Akuntansi keberlanjutan memberikan informasi berharga untuk pengambilan keputusan, memungkinkan perusahaan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi yang selaras dengan tujuan dan nilai keberlanjutan mereka.

Seperti yang sudah disebutkan dalam ide sebelumnya bahwa akuntansi keberlanjutan adalah disiplin ilmu yang sedang berkembang yang berusaha mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam praktik akuntansi tradisional. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran perusahaan akan pentingnya praktik-praktik berkelanjutan, akuntansi keberlanjutan telah mendapatkan daya tarik sebagai sarana untuk mengukur dan melaporkan dampak jangka panjang dari aktivitas bisnis.

Integrasi akuntansi keberlanjutan dalam bisnis sangat penting untuk mempromosikan tanggung jawab perusahaan, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan, dan mendorong penciptaan nilai jangka panjang.

1. Tanggung jawab perusahaan dan pertimbangan etis.

Integrasi akuntansi keberlanjutan dalam bisnis sangat penting untuk mempromosikan tanggung jawab perusahaan. Praktik akuntansi tradisional sering kali hanya berfokus pada kinerja keuangan, mengabaikan dampak yang lebih luas dari aktivitas bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan memasukkan akuntansi keberlanjutan, bisnis dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik-praktik yang etis dan bertanggung jawab. Hal ini

tidak hanya meningkatkan reputasi mereka, tetapi juga selaras dengan meningkatnya ekspektasi konsumen, investor, dan regulator agar bisnis beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Menurut Global Reporting Initiative (GRI), organisasi terkemuka dalam pelaporan keberlanjutan, lebih dari 90% dari 250 perusahaan terbesar di dunia saat ini melaporkan kinerja keberlanjutan mereka, yang mengindikasikan adanya pengakuan yang semakin besar terhadap pentingnya akuntansi keberlanjutan dalam mempromosikan tanggung jawab perusahaan (GRI, 2021).

2. Keterlibatan dan transparansi pemangku kepentingan.

Selain itu, integrasi akuntansi keberlanjutan dalam bisnis meningkatkan keterlibatan dan transparansi pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, karyawan, dan masyarakat, semakin tertarik untuk memahami dampak bisnis yang lebih luas di luar metrik keuangan. Akuntansi keberlanjutan menyediakan kerangka kerja bagi bisnis untuk mengkomunikasikan kinerja lingkungan dan sosial mereka secara transparan, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat dan meminta pertanggungjawaban bisnis atas dampaknya.

3. Penciptaan nilai jangka panjang.

integrasi akuntansi keberlanjutan dalam bisnis sangat penting untuk mendorong penciptaan nilai jangka panjang. Dengan memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial, perusahaan dapat menilai risiko dan peluang mereka dengan lebih baik di dunia yang berubah dengan cepat. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan strategis yang tepat yang tidak hanya menguntungkan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan dan daya saing jangka panjang.

3.2 Tantangan Mengintegrasikan Akuntansi Berkelanjutan dalam Bisnis

Salah satu tantangan utama dalam mengintegrasikan akuntansi berkelanjutan dalam bisnis adalah kurangnya kerangka kerja dan pedoman standar untuk mengukur dan melaporkan kinerja non-keuangan. Standar akuntansi tradisional terutama berfokus pada metrik keuangan, sehingga menyulitkan bisnis untuk secara efektif menangkap dan mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan mereka. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengembangkan standar akuntansi berkelanjutan yang diterima secara universal untuk memfasilitasi praktik pelaporan yang konsisten dan dapat dibandingkan di seluruh organisasi.

Selain itu, perusahaan sering kali menghadapi kesulitan dalam mengukur implikasi keuangan jangka panjang dari inisiatif keberlanjutan. Meskipun praktik-praktik keberlanjutan mungkin menimbulkan biaya awal, praktik-praktik tersebut dapat menghasilkan manfaat jangka panjang seperti peningkatan reputasi merek, mitigasi risiko, dan penghematan biaya. Namun, tidak adanya metodologi yang dapat diandalkan untuk menilai hasil keuangan dari investasi keberlanjutan menjadi penghalang yang signifikan bagi adopsi akuntansi berkelanjutan secara luas.

Tantangan penting lainnya adalah terbatasnya ketersediaan data berkualitas tinggi untuk mengukur kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial. Banyak perusahaan kesulitan mengakses data yang komprehensif dan dapat diandalkan tentang indikator lingkungan dan sosial, yang menghambat kemampuan mereka untuk melacak kemajuan dan menunjukkan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu berinvestasi dalam sistem pengumpulan data yang kuat dan berkolaborasi dengan rekan-rekan industri dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi dan keandalan data.

Selain itu, kurangnya kesadaran dan keahlian di antara para profesional akuntansi dan pengambil keputusan mengenai praktik akuntansi berkelanjutan menjadi hambatan yang

signifikan. Mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam pengambilan keputusan keuangan membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu lingkungan, ekonomi dan sosial dan potensi dampaknya terhadap kinerja bisnis. Oleh karena itu, diperlukan program pendidikan dan inisiatif pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para profesional akuntansi dalam prinsip-prinsip dan metodologi akuntansi berkelanjutan. perusahaan sering kali menghadapi penolakan dari investor dan pasar keuangan yang memprioritaskan keuntungan finansial jangka pendek daripada tujuan keberlanjutan jangka panjang. Pola pikir jangka pendek ini dapat melemahkan komitmen perusahaan untuk berinvestasi dalam inisiatif berkelanjutan dan mengintegrasikan pertimbangan tata kelola terkait ekonomi, sosial dan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan keterlibatan investor dan pemangku kepentingan untuk mengkomunikasikan nilai akuntansi berkelanjutan dalam mendorong penciptaan nilai jangka panjang dan manajemen risiko.

Integrasi akuntansi berkelanjutan dalam bisnis sangat penting untuk mengatasi tantangan keberlanjutan yang kompleks dan mencapai penciptaan nilai jangka panjang. Namun, bisnis menghadapi beberapa rintangan dalam mengadopsi dan menerapkan praktik akuntansi berkelanjutan, mulai dari kurangnya kerangka kerja standar dan ketersediaan data hingga kebutuhan akan kesadaran yang lebih besar dan keterlibatan pemangku kepentingan. Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan upaya bersama dari perusahaan, badan-badan pembuat standar, regulator, dan investor untuk mengembangkan kerangka kerja yang kuat, meningkatkan transparansi data, dan mendorong pergeseran pola pikir menuju penciptaan nilai yang berkelanjutan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, perusahaan dapat membuka potensi penuh dari akuntansi berkelanjutan untuk mendorong dampak positif terhadap lingkungan dan sosial sekaligus memastikan ketahanan keuangan jangka panjang.

Beberapa pembahasan lain berikut ini juga terkait tantangan integrasi akuntansi berkelanjutan dalam bisnis antara lain:

1. Pengungkapan sukarela: Pelaporan keberlanjutan seringkali bersifat sukarela, yang mengarah pada potensi kesenjangan informasi dan kemungkinan pengungkapan selektif sehingga sulit untuk secara akurat mengukur kinerja keberlanjutan perusahaan yang sebenarnya.
2. Berpikir jangka pendek: investor dan pemangku kepentingan mungkin memiliki perspektif jangka pendek, sementara keberlanjutan secara inheren merupakan konsep jangka panjang. Ketidakselarasan ini dapat menimbulkan tantangan dalam mengintegrasikan akuntansi keberlanjutan ke dalam praktik bisnis.
3. Biaya integrasi: usaha kecil dan menengah dapat menganggap biaya awal untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis inti mereka dan pelaporan sebagai beban. Hal ini dapat menghambat
4. Kompleksitas dan konsistensi: kompleksitas standar akuntansi keberlanjutan dan kebutuhan akan metodologi pelaporan yang konsisten dapat menimbulkan tantangan bagi organisasi, terutama UKM, dalam menerapkan akuntansi keberlanjutan secara efektif.

3.3 Peluang Mengintegrasikan Akuntansi Berkelanjutan dalam Bisnis

Beberapa peluang yang dapat diidentifikasi dalam mengintegrasikan akuntansi berkelanjutan dalam bisnis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Mengintegrasikan akuntansi berkelanjutan dalam bisnis memberikan peluang untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan memasukkan biaya lingkungan dan sosial ke dalam laporan keuangan, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Perusahaan yang

- mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam proses pengambilan keputusan akan mengungguli perusahaan-perusahaan lain dalam jangka panjang, karena mereka lebih siap dalam memitigasi risiko dan memanfaatkan peluang yang ada.
2. Meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan. Peluang lain terletak pada peningkatan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Akuntansi berkelanjutan memungkinkan perusahaan untuk secara transparan mengkomunikasikan kinerja lingkungan dan sosial mereka kepada para pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan regulator. Transparansi ini menumbuhkan kepercayaan dan kredibilitas, yang mengarah pada hubungan yang lebih kuat dengan para pemangku kepentingan. Perusahaan dengan pelaporan keberlanjutan yang transparan lebih mungkin menarik investor yang bertanggung jawab secara sosial dan mempertahankan hubungan positif dengan pelanggan dan karyawan.
 3. Penghematan biaya dan keuntungan efisiensi. Mengintegrasikan akuntansi berkelanjutan juga dapat menghasilkan penghematan biaya dan peningkatan efisiensi bagi bisnis. Dengan mengidentifikasi dan mengelola biaya lingkungan dan sosial, perusahaan dapat merampingkan operasi mereka, mengurangi limbah, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Sebuah laporan dari World Resources Institute menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi praktik akuntansi berkelanjutan mengalami penghematan biaya melalui peningkatan efisiensi energi, pengurangan limbah, dan peningkatan manajemen rantai pasokan.

3.4 Praktik Mengintegrasikan Akuntansi Berkelanjutan dalam Bisnis

Beberapa penelitian berikut ini adalah tentang bagaimana perusahaan mengintegrasikan akuntansi berkelanjutan dalam bisnis.

1. *Corporate sustainability accounting: beyond unfreezing.*

Untuk memfasilitasi perusahaan dalam menghadapi isu-isu keberlanjutan, pemahaman-pemahaman mengenai tantangan dalam pengadopsian praktik akuntansi keberlanjutan perlu diperoleh. Penelitian ini melakukan analisis kualitatif terhadap perkembangan terkait, berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan di 16 perusahaan di Inggris dan Jerman (Zvezdov, 2012). Makalah ini mengadopsi perspektif manajemen perubahan untuk mengidentifikasi hambatan dalam adopsi praktik akuntansi keberlanjutan dan mengelompokkannya dalam tiga tahap - unfreezing, moving, dan refreezing. Analisis ini dengan jelas mengklasifikasikan perusahaan-perusahaan ke dalam tiga tahap yang diusulkan. Sebagian besar perusahaan berada pada tahap unfreezing, karena tantangan kompleks yang diidentifikasi dalam mengatasi tahap ini. Akibatnya, tantangan-tantangan di luar tahap unfreezing masih harus diatasi. Wawasan yang diperoleh menjelaskan tantangan-tantangan dalam proses mengadopsi praktik akuntansi keberlanjutan dan berkontribusi dalam mempercepat pengadopsiannya.

2. *Sustainability accounting standard for increasing sustainable refurbishment projects.*

Perbaikan yang berkelanjutan merupakan pendekatan mendasar untuk mencapai tujuan iklim Uni Eropa. Beberapa tantangan dalam merehabilitasi area perumahan yang ada adalah sedikitnya standar berkualitas tinggi, kurangnya pendanaan, dan rendahnya minat masyarakat. Makalah ini bertujuan untuk menyajikan temuan-temuan dari pengembangan alat SAS - Standar Akuntansi Berkelanjutan dari berbagai perspektif pemangku kepentingan dan informasi dari periode pengujian. Kombinasi triangulasi dari tinjauan literatur, survei, dan wawancara dipilih. Tinjauan literatur membentuk dasar teori di lapangan. Pengalaman dengan alat SAS diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan peserta proyek dari asosiasi perumahan koperasi dan survei

untuk anggota dewan perumahan dari proyek percontohan yang dipilih (Lous *et al.*, 2022).

Perangkat SAS membentuk proses yang lebih baik untuk pembangunan berkelanjutan di koperasi perumahan, yang membahas semua aspek keberlanjutan, keterlibatan awal para pemangku kepentingan, dan pentingnya partisipasi penghuni. Proyek ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan yang setara sangat penting untuk mencapai tujuan dan bahwa komitmen, kepercayaan, komunikasi, dan berbagi pengetahuan adalah dasarnya. KPI yang telah ditetapkan merupakan indikator yang baik untuk analisis kondisi dan rencana ambisi. Perangkat SAS dapat berkontribusi pada proses perbaikan yang lebih lancar dengan memprioritaskan langkah-langkah perbaikan yang tepat.

3. *Factors affecting the application of sustainable accounting and sustainable development in enterprises.*

Artikel ini mensintesis perspektif makro dan mikro pada akuntansi keberlanjutan pada pandangan tujuan, metode pengukuran, prinsip-prinsip, dan laporan akuntansi keberlanjutan. Penelitian ini juga menganalisis bahwa penerapan akuntansi keberlanjutan dapat meningkatkan pembangunan berkelanjutan di perusahaan. Penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keberlanjutan akan membawa pembangunan berkelanjutan bagi perusahaan dan masyarakat, sehingga mendorong perusahaan untuk mengadopsi akuntansi keberlanjutan secara sukarela (Giang *et al.*, 2022). Artikel ini juga mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan akuntansi keberlanjutan di perusahaan. Seratus sembilan puluh tujuh perusahaan manufaktur di 6 sektor disurvei: produksi pupuk, produksi baja, pengolahan karet, produksi kemasan plastik, dan pengolahan makanan Metode analisis data primer yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode pemodelan persamaan struktural SEM. Artikel ini menggunakan perangkat lunak AMOS untuk mengevaluasi dan mengukur

pengaruh masing-masing faktor terhadap penerapan akuntansi berkelanjutan di perusahaan. Peneliti juga telah berhasil menunjukkan bahwa jika diterapkan, akuntansi berkelanjutan akan membawa pembangunan berkelanjutan baik bagi bisnis maupun masyarakat.

4. *Sustainability: the adoption of green economy and sustainable accounting principles by South African listed companies and lesson learnt.*

Dunia sedang menghadapi berbagai tantangan seperti perang, kemiskinan, ketidakadilan, degradasi lingkungan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. Tantangan-tantangan ini telah meresahkan manusia dalam kehidupannya di dunia sehingga mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengajak semua negara bersatu dalam mengatasi tantangan global tersebut. Interaksi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan komunitas global menghasilkan pemahaman bahwa pemberantasan kemiskinan harus dibarengi dengan strategi yang mendorong pertumbuhan ekonomi sambil memenuhi berbagai kebutuhan sosial serta perubahan iklim dan isu-isu lingkungan.

Di antara strategi untuk mengatasi tantangan global yang disebutkan di atas adalah akuntansi berkelanjutan dan ekonomi hijau. Sebagai anggota komunitas global, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Afrika Selatan juga memiliki peran dalam memerangi tantangan-tantangan keberlanjutan. Artikel yang dilakukan oleh Denhere (2022) ini memberikan kontribusi pada literatur tentang keberlanjutan, khususnya tentang adopsi ekonomi hijau dan akuntansi berkelanjutan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Afrika Selatan serta pelajaran yang dapat dipetik dari proses tersebut.

5. *Social, Environmental and sustainability reporting and organizational value creation? Whose values? Whose creation?*

Tujuan dari artikel yang dibuat oleh Gray (2006) ini adalah untuk menguji sejauh mana akuntansi dan pelaporan sosial, lingkungan dan keberlanjutan dapat atau harus berkontribusi terhadap nilai pemegang saham dan sejalan dengan itu, untuk mempertimbangkan tantangan yang dapat ditawarkan terhadap pandangan konvensional tentang "nilai" yang mendukung akuntansi keuangan tradisional. Artikel ini kemudian digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan beberapa data yang relatif baru tentang pembangunan berkelanjutan yang berimplikasi pada pertimbangan kita tentang "nilai". Meskipun diambil dari berbagai data kontekstual sekunder, makalah ini terutama bersifat argumentatif dan berusaha menantang sejumlah asumsi implisit dalam akuntansi konvensional dan akuntansi yang lebih "kritis".

Pelaporan sosial dan lingkungan yang substantif dan terutama, pelaporan berkualitas tinggi tentang (ketidak)keberlanjutan akan menunjukkan bahwa kapitalisme keuangan internasional modern dan lembaga-lembaga utama yang mendukungnya pada dasarnya dirancang untuk memaksimalkan perusakan lingkungan dan pengikisan gagasan realistis tentang keadilan sosial. Makalah ini berusaha untuk menunjukkan perdebatan ini dan implikasi yang kuat dan mendasar dari hal ini terhadap pelaporan keuangan konvensional dan penyesuaian dangkal dan kosmetik terhadap pelaporan tersebut melalui "model baru pelaporan organisasi".

6. *Seeking legitimacy for new assurance forms: the case of assurance on sustainability reporting.*

Berdasarkan pengembangan konsepsi legitimasi yang lebih baik daripada yang telah digunakan dalam penelitian audit/assurance dan akuntansi keberlanjutan sebelumnya, penelitian ini menganalisis bagaimana proses legitimasi yang diadopsi oleh praktisi asuransi keberlanjutan di sebuah perusahaan jasa profesional besar telah berevolusi bersama dan berdampak pada upaya mereka untuk mengembangkan bentuk praktik asuransi ini -

khususnya konstruksi pernyataan asurans. Analisis ini mengungkapkan adanya interaksi yang kompleks dan saling bergantung antara upaya untuk mendapatkan legitimasi pragmatis, moral, dan kognitif dengan tiga konstituen utama, yaitu klien yang meminta jasa asurans keberlanjutan, pengguna non-klien (yang dikonstruksikan secara sosial) atas laporan asurans, dan Departemen Risiko internal perusahaan yang menyetujui penyusunan pernyataan asurans.

Mengamankan jenis-jenis legitimasi ini terbukti membutuhkan adopsi dan penyesuaian berbagai strategi legitimasi sesuai dengan konstituen yang ingin dipengaruhi oleh para praktisi. Mengembangkan legitimasi pragmatis dengan klien bergantung pada pembentukan legitimasi moral dengan pengguna laporan asurans non-klien, sementara mengamankan legitimasi moral dengan pengguna non-klien bergantung pada perolehan legitimasi pragmatis dengan Departemen Risiko internal perusahaan. Strategi legitimasi para praktisi didukung oleh komitmen untuk membuka dialog dalam proses asurans yang terlihat jelas dalam keterlibatan mereka dengan pengguna potensial asurans dan upaya mereka untuk memperluas konten pernyataan asurans dan mendorong pengaruh pengguna atas apa yang diasuransikan. Hal ini memberikan tantangan terhadap kekhawatiran Power (1994, 1999) mengenai kecenderungan bentuk asurans baru yang membatasi perdebatan dan dialog serta mengungkapkan domain empiris yang langka dimana seruan Power (2003b) untuk narasi yang lebih disesuaikan dan informatif dalam pelaporan asurans telah diindahkan (Dwyer, Owen and Unerman, 2011).

7. *Sustainability and stakeholder management: Then need for new corporate performance evaluation and reporting systems.*

Keberlanjutan perusahaan, yaitu kapasitas perusahaan untuk terus beroperasi dalam jangka waktu yang lama, bergantung pada keberlanjutan hubungan

dengan para pemangku kepentingan Perrini & Tencati (2006). Pandangan pemangku kepentingan yang baru terhadap perusahaan ini melampaui pekerjaan sebelumnya tentang triple bottom line dan balanced scorecard. Perusahaan membutuhkan sistem yang tepat untuk mengukur dan mengendalikan perilaku mereka sendiri agar dapat menilai apakah mereka menanggapi keprihatinan para pemangku kepentingan dengan cara yang efektif dan mengkomunikasikan hasil-hasil yang telah dicapai.

Sistem akuntansi keberlanjutan ini harus memiliki tujuan untuk memperluas dan mengintegrasikan pendekatan keuangan tradisional terhadap pengukuran kinerja perusahaan, dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan. Artikel ini menyajikan sistem evaluasi dan pelaporan keberlanjutan, sebuah metodologi terpadu yang bertujuan untuk memantau dan melacak dari sudut pandang kualitatif dan kuantitatif kinerja perusahaan secara keseluruhan menurut kerangka kerja pemangku kepentingan, sesuai dengan kebutuhan manajerial usaha kecil dan menengah.

8. *Engaging with organization in pursuit of improved sustainability accounting and performance.*

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Carol & Carlos (2007) adalah untuk menyajikan sebuah kasus untuk penelitian dalam akuntansi dan akuntabilitas etika, sosial dan lingkungan (atau keberlanjutan) yang melibatkan organisasi-organisasi yang mengklaim mengelola dan melaporkan kinerja keberlanjutan mereka. Selain itu, makalah ini juga mengulas kontribusi dalam edisi khusus ini. Penelitian ini memberikan analisis dan kritik terhadap sejauh mana keterlibatan penelitian di bidang akuntansi dan akuntabilitas keberlanjutan. Penelitian ini mengacu pada bidang manajemen, akuntansi manajemen, dan akuntansi kritis untuk menyajikan kasus keterlibatan penelitian lebih lanjut dengan akuntansi keberlanjutan dan praktik akuntabilitas. Hasil penelitian menemukan bahwa literatur yang ada di bidang akuntansi keberlanjutan dan

pelaporan, berbeda dengan bidang akuntansi manajemen dan manajemen, sebagian besar mengabaikan praktik dalam organisasi.

Kurangnya "penelitian yang menarik" ditemukan karena kekhawatiran tentang peningkatan luasnya peserta dalam agenda akuntansi sosial dan "penangkapan manajerial". Penelitian ini berpendapat bahwa penelitian lebih lanjut yang melibatkan organisasi diperlukan untuk mengidentifikasi bagaimana sistem akuntansi dan manajemen dapat mengurangi dampak keberlanjutan yang negatif. Makalah ini berpendapat bahwa penelitian semacam itu dapat mengambil manfaat dari wawasan metodologis dan teoritis dari disiplin ilmu lain. Untuk keterbatasan masalah, peneliti menyarankan kontribusi lebih lanjut yang dapat diberikan oleh penelitian di masa depan yang melibatkan organisasi. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah penelitian pelibatan dalam akuntansi dan pelaporan keberlanjutan memiliki potensi untuk meningkatkan teori, praktik, dan kinerja keberlanjutan organisasi. Dengan menggunakan metode dan teori dari disiplin ilmu lain dan makalah dalam edisi khusus ini, makalah ini menyajikan jalan ke depan bagi para peneliti yang terlibat dengan organisasi yang mempraktikkan akuntansi dan pelaporan keberlanjutan.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut terlihat jelas bagaimana peran integrasi akuntansi berkelanjutan memberikan kontribusi yang berarti dalam berbagai aspek.

3.5 Kesimpulan

Akuntansi keberlanjutan menawarkan beberapa manfaat bagi bisnis. Pertama, akuntansi keberlanjutan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kinerja organisasi secara keseluruhan dengan mempertimbangkan tidak hanya hasil keuangan tetapi juga dampak lingkungan dan sosial. Pendekatan holistik ini, yang sering disebut sebagai *triple bottom line*, memungkinkan perusahaan untuk menilai

keberlanjutan jangka panjang mereka dengan lebih baik dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Selain itu, akuntansi keberlanjutan dapat meningkatkan reputasi dan nilai merek perusahaan dengan menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial, yang dapat menarik konsumen dan investor yang sadar lingkungan.

Terlepas dari potensi manfaatnya, penerapan akuntansi keberlanjutan dapat menimbulkan tantangan bagi bisnis. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya metrik dan kerangka kerja pelaporan yang terstandarisasi, yang menyulitkan untuk membandingkan dan mengukur kinerja keberlanjutan di berbagai organisasi. Selain itu, mengumpulkan dan memverifikasi data non-keuangan dapat memakan banyak sumber daya dan rumit, sehingga mengharuskan perusahaan untuk berinvestasi dalam sistem pengumpulan data baru dan pelatihan karyawan. Selain itu, mungkin ada resistensi terhadap perubahan dalam organisasi, karena akuntansi keberlanjutan sering kali membutuhkan perubahan pola pikir dan proses bisnis.

Akuntansi keberlanjutan memiliki dampak besar pada proses pengambilan keputusan bisnis. Dengan memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai kinerja organisasi, termasuk faktor lingkungan dan sosial, akuntansi keberlanjutan memungkinkan para manajer untuk membuat keputusan yang lebih tepat yang selaras dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang. Sebagai contoh, akuntansi keberlanjutan dapat membantu mengidentifikasi peluang penghematan biaya melalui langkah-langkah efisiensi energi, pengurangan limbah, dan praktik-praktik pengadaan yang berkelanjutan. Akuntansi keberlanjutan juga dapat menginformasikan keputusan strategis yang terkait dengan pengembangan produk, manajemen rantai pasokan, dan pelibatan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kelangsungan dan ketahanan jangka panjang organisasi.

Kesimpulannya, akuntansi keberlanjutan memiliki dampak yang signifikan terhadap bisnis, menawarkan manfaat

seperti pengukuran kinerja yang lebih baik, peningkatan reputasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, akuntansi keberlanjutan juga menghadirkan tantangan terkait standarisasi, pengumpulan data, dan perubahan organisasi. Karena pentingnya keberlanjutan terus berkembang di dunia bisnis, adopsi akuntansi keberlanjutan kemungkinan akan menjadi semakin penting bagi bisnis yang ingin berkembang dalam lanskap global yang berubah dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Carol, A. and Carlos, L.-G. 2007. 'Engaging with organization in pursuit of improved sustainability \ accounting and performance', *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 20(3). Available at: <https://doi.org/10.1108/09513570710748535>.
- Denhere, V. 2022. 'Sustainability: The adoption of green economy and sustainable accounting principles by South African listed companies and lessons learnt', *International Journal of Research in Business and Social Science*, 11(5), pp. 366–376.
- Dwyer, B.O., Owen, D. and Unerman, J. 2011. 'Seeking legitimacy for new assurance forms: the case of assurance on sustainability reporting', *Accounting, Organizations and Society*, 36(1), pp. 31–52. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.aos.2011.01.002>.
- Giang, N.P. *et al.* 2022. 'Factors affecting the application of sustainable accounting and sustainable development in enterprises', *Multicultural Education*, 8(2), pp. 222–235. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6296441>.
- Gray, R. 2006. 'Social, environmental and sustainability reporting and organisational value creation? Whose value? Whose creation?', *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 19(6), pp. 793–819. Available at: <https://doi.org/10.1108/09513570610709872>.
- GRI. 2021. *About GRI, Global Reporting Initiative*.
- Lous, M. *et al.* 2022. 'Sustainable accounting standard for increasing sustainable refurbishment projects Sustainable accounting standard for increasing sustainable refurbishment projects', in *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*. IOP Publishing. Available at: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1101/6/062029>.

- Perrini, F; Tencati, A. 2006. 'Sustainability and stakeholder management: the need for new corporate performance evaluation and reporting system', *Business Strategy and the Environment*, 15(5), pp. 296–308.
- Schaltegger, S. and Burritt, R.L. 2010. 'Sustainability accounting for companies: Catchphrase or decision support for business leaders?', *Journal of World Business*, 45(4), pp. 375–384. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2009.08.002>.
- Zvezdov, D. 2012. 'Corporate sustainability accounting: beyond unfreezing', *Journal of the Asia-Pacific Centre for Environmental Accountability*, 18(3), pp. 181–198.

BAB 5

PENGUKURAN KINERJA LINGKUNGAN

Oleh Annisa Nabila Hasan

5.1 Definisi Kinerja Lingkungan

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, kinerja lingkungan mencakup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui berbagai upaya yang terorganisir dan terpadu untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah kerusakan dan pencemaran. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan terdiri dari berbagai aktivitas yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah, yaitu aktivitas perencanaan, aktivitas pemanfaatan, aktivitas pengawasan, dan aktivitas penegakan hukum. Sementara, aktivitas yang menjadi tanggung jawab dan wewenang bersama antara pemerintah dan entitas bisnis adalah aktivitas pengendalian dan aktivitas pemeliharaan.

Bab ini berfokus pada kegiatan yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan pelaku usaha, yaitu aktivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta aktivitas pemeliharaan. Sehingga, kinerja lingkungan pada konteks ini difokuskan pada aktivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta aktivitas pemeliharaan yang terdiri dari:

1. Aktivitas pengendalian: pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
2. Aktivitas pemeliharaan: pencadangan sumber daya alam, upaya konservasi sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer.

Sebelum membahas kinerja lingkungan, kita perlu mengetahui definisi pencemaran dan kerusakan lingkungan karena tujuan utama dari pengukuran kinerja lingkungan adalah

mencegah terjadinya kedua hal tersebut. Pencemaran lingkungan terjadi ketika terdapat komponen, zat, energi, ataupun makhluk hidup ke dalam lingkungan yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan peraturan perundangan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Sementara kerusakan lingkungan adalah perubahan terhadap lingkungan hidup (baik kondisi kimia, hayati, ataupun fisik) yang melebihi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

5.2 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan: Aktivitas Pencegahan

Terdapat tiga aktivitas utama dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, yaitu:

1. Aktivitas pencegahan atau preventif yang dilaksanakan sebelum pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi.
2. Aktivitas penanggulangan dan pemulihan yang dilaksanakan setelah pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi.

Tentu saja, kinerja lingkungan yang lebih baik adalah yang menekankan pada aktivitas preventif dibandingkan melakukan penanggulangan ataupun pemulihan setelah pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi.

5.2.1 Instrumen Pencegahan Pada Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terkait baku mutu sebagai berikut:

1. Baku Mutu Lingkungan Hidup

Jika individu atau entitas usaha telah mendapatkan izin dari pemerintah berwenang dan telah memenuhi baku mutu lingkungan hidup, yaitu standar yang digunakan untuk mengukur tingkat pencemaran lingkungan, maka individu atau entitas usaha tersebut diperkenankan membuang limbahnya. Baku mutu ini mencakup standar yang mengatur

ambang batas pencemaran emisi, gangguan, air dan air limbah, air laut, serta udara ambien.

2. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Untuk menentukan kerusakan lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup digunakan sebagai dasar pengukuran yang dibagi menjadi dua kelompok, yakni kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Kriteria baku kerusakan ekosistem terbagi kedalam kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa, kerusakan terkait kebakaran hutan atau lahan (karhutla), kerusakan terumbu karang, kerusakan mangrove, kerusakan gambut, kerusakan karst, dan kerusakan padang lamun.

Kriteria baku kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim didasarkan pada parameter, diantaranya adalah parameter kenaikan temperatur dan kenaikan muka air laut, badai, dan kekeringan.

3. AMDAL

Seluruh entitas usaha yang memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mengatur jenis-jenis usaha yang harus menyusun AMDAL. Dokumen AMDAL merupakan basis untuk menetapkan apakah sebuah usaha layak secara lingkungan dan memuat, diantaranya: Pengkajian terhadap dampak rencana usaha, termasuk estimasi besaran dan sifat material dampak rencana usaha; Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha, termasuk memperoleh saran dan tanggapan warga masyarakat atas rencana usaha; Evaluasi menyeluruh potensi dampak untuk menentukan apakah rencana usaha layak dari segi lingkungan; serta Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

4. UKL-UPL

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan

atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan, setiap usaha yang wajib menyusun AMDAL juga dikenakan kewajiban untuk menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

5. Perizinan

Setiap usaha yang memenuhi syarat untuk memiliki AMDAL dan UKL-UPL harus memiliki izin lingkungan. Izin ini diperlukan untuk memperoleh izin usaha dan dikeluarkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Izin ini diterbitkan oleh pejabat berwenang di lokasi usaha.

6. Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Analisis risiko lingkungan wajib disusun oleh seluruh entitas usaha yang memiliki potensi untuk memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup, mengancam ekosistem, serta mengancam kehidupan, kesehatan, dan keselamatan manusia. Analisis risiko lingkungan hidup merupakan upaya yang komprehensif akan pengkajian dan pengelolaan risiko sampai dengan pengkomunikasian risiko kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

7. Audit Lingkungan Hidup

Audit lingkungan hidup sangat dianjurkan untuk kegiatan bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja lingkungan hidup entitas bisnis tersebut, yang akan mendukung upaya pelestarian lingkungan. Bisnis yang memiliki risiko lingkungan tinggi atau yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan audit lingkungan. Audit lingkungan hidup dilakukan secara rutin oleh auditor lingkungan hidup yang wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.

5.2.2 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan : Penanggulangan

Setiap individu atau perusahaan yang mencemari dan merusak lingkungan hidup harus melakukan tindakan penanggulangan sesuai dengan langkah-langkah berikut: (1) Memberikan peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan kepada masyarakat untuk memberi tahu mereka tentang

bahayanya; (2) Mengisolasi diri dari pencemaran dan kerusakan; dan (3) Menghentikan sumber pencemaran dan kerusakan.

5.2.3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan : Pemulihan

Setiap individu atau perusahaan yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup harus melakukan hal-hal berikut untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup:

1. Menghentikan sumber pencemaran dan membersihkan unsur pencemar.
2. Melakukan remediasi atau membersihkan permukaan tanah yang telah tercemar
3. Melakukan rehabilitasi atau pemulihan kembali fungsi lingkungan
4. Melakukan restorasi atau pengembalian ke kondisi semula

Setiap pemegang izin lingkungan diwajibkan untuk menyimpan dana penjaminan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh pejabat berwenang. Kemudian, Pemerintah yang berwenang tersebut dapat menunjuk pihak ketiga untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan tersebut.

5.3 Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui berbagai upaya berikut:

1. Konservasi sumber daya alam, yang terdiri dari perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam dengan cara yang lestari.
2. Pencadangan sumber daya alam
3. Pelestarian fungsi atmosfer
4. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
5. Upaya perlindungan lapisan ozon
6. Upaya perlindungan terhadap hujan asam

5.4 Pengukuran Kinerja Lingkungan Berdasarkan Pemenuhan Baku Mutu

Kinerja lingkungan dapat diukur berdasarkan pemenuhan atas peraturan lingkungan hidup yang biasanya diukur melalui pemenuhan baku mutu yang diatur dalam berbagai Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

5.4.1 Baku Mutu Emisi

Baku mutu emisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 (Lampiran VII) Terkait Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut adalah daftar baku mutu terkait emisi yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan:

No	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu	Sistem Pengukuran
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	1 jam	150 µg/m ³	aktif kontinu
				aktif manual
		24 jam	75 µg/m ³	aktif kontinu
		1 Tahun	45 µg/m ³	aktif kontinu
2	Karbon Monoksida (CO)	1 jam	10000 µg/m ³	aktif kontinu
		8 jam	4000 µg/m ³	aktif kontinu
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	1 jam	200 µg/m ³	aktif kontinu
				aktif manual
		24 jam	65 µg/m ³	aktif kontinu
		1 Tahun	50 µg/m ³	aktif kontinu

4	Oksidan fotokimia (O*) sebagai Ozon (Os)	1 Jam	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	aktif kontinu
				aktif manual#
		8 Jam	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	aktif kontinu##
5	Hidrokarbon Non 3 jam Metana (NMHC)	3 Jam	160 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	aktif kontinu###
6	Partikulat debu < 100 pm (TSP)	24 Jam	230 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	aktif manual
	Partikulat debu < 10 pm (PM10)	24 Jam	75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	aktif kontinu
		1 Tahun	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	aktif manual
	Partikulat debu <2,5 pm (PM25)	24 Jam	55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	aktif kontinu
				aktif manual
		1 Tahun	15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	aktif kontinu
7	Timbal (Pb)	24 Jam	2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	aktif manual

Keterangan:

$\mu\text{g}/\text{m}^3$ = konsentrasi dalam mikrogram per meter kubik, pada kondisi atmosfer normal, yaitu tekanan (P) 1 atm dan temperatur (T) 25°C.

Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 1 (satu) jam adalah konsentrasi hasil pengukuran yang dilakukan setiap 30 (tiga puluh) menit (dalam 1 jam dilakukan 2 kali pengukuran) dan dilakukan di antara pukul 11:00 – 14:00 waktu setempat.

Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 8 (delapan) jam adalah konsentrasi dari waktu pengukuran yang dilakukan di antara pukul 06:00 – 18:00 waktu setempat.

Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 3 (tiga) jam adalah konsentrasi dari waktu pengukur yang dilakukan di antara pukul 06:00 – 10:00 waktu setempat.

Gambar 5.1. Baku Mutu Emisi
(Sumber : PP No. 22 Tahun 2021)

5.4.2 Baku Mutu Limbah Cair

Baku mutu limbah cair diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2014 (Lampiran XLVII) Terkait: Baku Mutu Air Limbah. Berikut adalah daftar baku mutu terkait limbah cair yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan:

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BELUM MEMILIKI BAKU MUTU AIR LIMBAH YANG DITETAPKAN			
Parameter	Satuan	GOLONGAN	
		I	II
Temperatur	°C	38	40
Zat padat larut (TDS)	mg/L	2.000	4.000
Zat padat suspensi (TSS)	mg/L	200	400
pH	-	6,0 - 9,0	6,0 - 9,0
Besi terlarut (Fe)	mg/L	5	10
Mangan terlarut (Mn)	mg/L	2	5
Barium (Ba)	mg/L	2	3
Tembaga (Cu)	mg/L	2	3
Seng (Zn)	mg/L	5	10
Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/L	0,1	0,5
Krom Total (Cr)	mg/L	0,5	1
Cadmium (Cd)	mg/L	0,05	0,1
Air Raksa (Hg)	mg/L	0,002	0,005
Timbal (Pb)	mg/L	0,1	1
Stanum (Sn)	mg/L	2	3
Arsen (As)	mg/L	0,1	0,5
Selenium (Se)	mg/L	0,05	0,5
Nikel (Ni)	mg/L	0,2	0,5
Kobalt (Co)	mg/L	0,4	0,6
Sianida (CN)	mg/L	0,05	0,5
Sulfida (H ₂ S)	mg/L	0,5	1
Fluorida (F)	mg/L	2	3
Klorin bebas (Cl ₂)	mg/L	1	2
Amonia-Nitrogen (NH ₃ -N)	mg/L	5	10
Nitrat (NO ₃ -N)	mg/L	20	30
Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	1	3
Total Nitrogen	mg/L	30	60
BOD ₅	mg/L	50	150
COD	mg/L	100	300
Senyawa aktif biru metilen	mg/L	5	10
Fenol	mg/L	0,5	1
Minyak & Lemak	mg/L	10	20
Total Bakteri Koliform	MPN/100 mL	10.000	

Gambar 5.2. Baku Mutu Air Limbah
(Sumber : Permen LHK No. 5 Tahun 2014)

5.4.3 Baku Mutu Limbah B3

Baku mutu air limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Terkait: Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Berikut adalah daftar baku mutu terkait limbah B3 yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan:

BAKU MUTU AIR LIMBAH
PADA FASILITAS PENYIMPANAN LIMBAH B3
BERUPA WASTE PILE DAN WASTE IMPOUNDMENT

No.	Parameter	Konsentrasi Parameter Maksimum	
		Nilai	Satuan
Fisika			
1	Suhu	38	°C
2	Zat padat terlarut	2000	mg/L
3	Zat padat tersuspensi	200	mg/L
Kimia			
4	pH	6-9	
5	Besi terlarut, Fe	5	mg/L
6	Mangan terlarut, Mn	2	mg/L
7	Barium, Ba	2	mg/L
8	Tembaga, Cu	2	mg/L
9	Seng, Zn	5	mg/L
10	Krom valensi enam, Cr ⁶⁺	0,1	mg/L
11	Krom total, Cr	0,5	mg/L
12	Kadmium, Cd	0,05	mg/L
13	Merkuri, Hg	0,002	mg/L
14	Timbal, Pb	0,1	mg/L
15	Stanum, Sn	2	mg/L
16	Arsen, As	0,1	mg/L
17	Selenium, Se	0,05	mg/L
18	Nikel, Ni	0,2	mg/L
19	Kobalt, Co	0,4	mg/L
20	Sianida, CN ⁻	0,05	mg/L
21	Sulfida, S ²⁻	0,5	mg/L
22	Fluorida, F	2	mg/L
23	Klorin bebas, Cl ₂	1	mg/L

No.	Parameter	Konsentrasi Parameter Maksimum	
		Nilai	Satuan
24	Amoniak Nitrogen, NH_3N	5	mg/L
25	Nitrat, NO_3^-	20	mg/L
26	Nitrit, NO_2^-	1	mg/L
27	BOD5	50	mg/L
28	COD	100	mg/L
29	Senyawa aktif biru metilen (MBAS)	5	mg/L
30	Fenol	0,5	mg/L
31	Minyak dan lemak	10	mg/L
32	AOX	0,5	mg/L
33	PCBs	0,005	mg/L
34	PCDFs	10	mg/L
35	PCDDs	10	mg/L

Gambar 5.3. Baku Mutu Limbah B3
(Sumber : Permen LHK No. 6 Tahun 2021)

5.4.4 Baku Mutu Limbah Non-B3

Baku mutu limbah non-B3 diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 Terkait: Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun. Berikut adalah daftar baku mutu terkait limbah Non-B3 yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan:

BAKU MUTU EMISI PENGURANGAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SECARA TERMAL		
No	Parameter	Batas Maksimum (mg/Nm ³)
1.	Total Partikulat	120
2.	Sulfur Dioksida (SO_2)	210
3.	Oksida Nitrogen (NO_x)	470
4.	Hidrogen Klorida (HCl)	10
5.	Merkuri (Hg)	3
6.	Karbon Monoksida (CO)	625
7.	Hidrogen Fluorida (HF)	2

Keterangan:

- Volume gas diukur dalam keadaan standar (25°C) dan tekanan 1 (satu) atmosfer.
- Semua parameter dikoreksi dengan Oksigen (O_2) sebesar 11% (sebelas persen).

Gambar 5.4. Baku Mutu Limbah B3
(Sumber : Permen LHK No. 19 Tahun 2021)

5.4.5 Baku Mutu Kualitas Udara

Baku mutu kualitas udara diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 Terkait: Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), Lampiran I Permen LHK No. 14 Tahun 2020. Berikut adalah daftar baku mutu terkait kualitas udara yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan:

A. Tabel Konversi Nilai Konsentrasi Parameter ISPU

ISPU	24 Jam partikulat (PM ₁₀) µg/m ³	24 Jam partikulat (PM _{2.5}) µg/m ³	24 Jam sulfur dioksida (SO ₂) µg/m ³	24 Jam karbon monoksida (CO) µg/m ³	24 Jam ozon (O ₃) µg/m ³	24 jam nitrogen dioksida (NO ₂) µg/m ³	24 Jam hidrokarbon (HC) µg/m ³
0 - 50	50	15,5	52	4000	120	80	45
51 - 100	150	55,4	180	8000	235	200	100
101 - 200	350	150,4	400	15000	400	1130	215
201 - 300	420	250,4	800	30000	800	2260	432
>300	500	500	1200	45000	1000	3000	648

Keterangan:

- Data pengukuran selama 24 jam secara terus-menerus.
- Hasil perhitungan ISPU parameter partikulat (PM_{2.5}) disampaikan tiap jam selama 24 jam.
- Hasil perhitungan ISPU parameter partikulat (PM₁₀), sulfur dioksida (SO₂), karbon monoksida (CO), ozon (O₃), nitrogen dioksida (NO₂) dan hidrokarbon (HC), diambil nilai ISPU parameter tertinggi dan paling sedikit disampaikan setiap jam 09.00 dan jam 15.00.

B. Tata Cara Perhitungan

menggunakan persamaan:

$$I = \frac{(I_a - I_b)}{(X_a - X_b)} (X_t - X_b) + I_b \dots \dots \dots (1)$$

- I = ISPU terhitung
- Ia = ISPU batas atas
- Ib = ISPU batas bawah
- Xa = Konsentrasi ambien batas atas (µg/m³)
- Xb = Konsentrasi ambien batas bawah (µg/m³)
- Xx = Konsentrasi ambien nyata hasil pengukuran (µg/m³)

Kategori ISPU	Status Warna	Angka Rentang
Baik	Hijau	1–50
Sedang	Biru	51–100
Tidak Sehat	Kuning	101–200
Sangat Tidak Sehat	Merah	201–300
Berbahaya	Hitam	> 301

Gambar 5.5. Baku Mutu Kualitas Udara
(Sumber : Permen LHK No. 14 Tahun 2020)

5.4.6 Baku Mutu Kebisingan

Baku mutu kebisingan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016 Terkait: Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri. Berikut adalah daftar baku mutu kebisingan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan:

Satuan	Durasi Paparan Kebisingan per Hari	Level Kebisingan (dBA)
Jam	24	80
	16	82
	8	85
	4	88
	2	91
	1	94
Menit	30	97
	15	100
	7,5	103
	3,75	106
	1,88	109
	0,94	112
Detik	28,12	115
	14,06	118
	7,03	121
	3,52	124
	1,76	127
	0,88	130
	0,44	133
	0,22	136
	0,11	139

Gambar 5.6. Baku Mutu Kebisingan
(Sumber : Permenkes No. 70 Tahun 2016)

5.5 Pengukuran Kinerja Lingkungan Berdasarkan PROPER

Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan *Public Disclosure Program for Environmental Compliance* (PROPER), yang merupakan program tambahan yang mendukung instrumen penataan lainnya agar pengelolaan

lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan *Good Corporate Governance*.

Ada dua jenis kriteria penilaian PROPER: (1) Kriteria Penilaian Ketaatan, yang berarti entitas bisnis melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan yang diundangkan; dan (2) Kriteria lebih dari yang diperlukan dalam peraturan (*Beyond Compliance*), yang berarti entitas bisnis melakukan pengelolaan lingkungan melebihi peraturan yang diundangkan.

5.5.1 Kriteria Penilaian Ketaatan

Untuk memperoleh Kriteria Penilaian Ketaatan, Perusahaan harus memenuhi kriteria berikut ini:

1. Persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya, termasuk AMDAL, UKL/UPL, ataupun dokumen pengelolaan lingkungan lainnya.
2. Pengendalian Pencemaran Air (yang mencakup diantaranya titik penataan, baku mutu, dan pemantauan oleh laboratorium terakreditasi).
3. Pengendalian Pencemaran Udara (yang mencakup diantaranya baku mutu emisi, proses pemantauan, dan prasarana sampling.)
4. Pengelolaan Limbah B3 (yang mencakup diantaranya pendataan jenis dan volume limbah, pengelolaan, dan izin pengelolaan limbah B3).
5. Pengendalian Pencemaran Air Laut (yang mencakup diantaranya perizinan dan pelaksanaan pembuangan air limbah);
6. Potensi kerusakan lahan (terbatas untuk aktivitas pertambangan)

5.5.2 Kriteria Beyond Compliance

Untuk memperoleh Kriteria *Beyond Compliance*, Perusahaan harus memenuhi kriteria berikut ini:

1. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (termasuk sistem pengelolaan lingkungan yang baik di sepanjang rantai pasok).
2. Upaya efisiensi energi (berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi energi baik dari proses produksi maupun proses

pendukung, misalnya redesain dan reengineering untuk proses yang lebih ramah lingkungan, *green building*, ataupun *green transportation*).

3. Upaya penurunan emisi, (termasuk diantaranya emisi GRK, dan emisi lainnya seperti bahan perusak ozon (ODS), penggunaan EBT dalam proses operasi, ataupun konversi ke bahan bakar bio).
4. Implementasi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) limbah B3 dan Non-B3 (yang ditekankan pada upaya preventif dan pemanfaatan kembali limbah, hal ini juga terkait dengan konsep ekonomi sirkuler untuk minimalisasi limbah dan material yang diekstrak).
5. Konservasi air dan reduksi pencemaran air limbah (termasuk diantaranya intensitas pemakaian air dalam kegiatan operasi serta upaya untuk menurunkan kandungan cemaran dalam air limbah)
6. Perlindungan keanekaragaman hayati (termasuk diantaranya upaya pemeliharaan kelestarian biodiversitas)
7. Program Pengembangan Masyarakat yang menggunakan pemetaan sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Rencana strategis jangka panjang dimasukkan ke dalam program tahunan, memenuhi kebutuhan kelompok rentan, memiliki indikator yang jelas untuk mengukur capaian program, dan proses perencanaan melibatkan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar lokasi program.

5.5.3 Peringkat Dalam PROPER

Pemeringkatan PROPER didasarkan kepada kinerja lingkungannya. Secara berturut-turut, peringkat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peringkat HITAM: Perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang buruk dan berpotensi besar dalam merusak lingkungan, sehingga menganam izin lingkungan yang sebelumnya telah didapatkan.
2. Peringkat MERAH: Perusahaan berhasil meraih kinerja lingkungan (dalam konteks ini telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan) namun, kesesuaian dengan persyaratan hanya dicapai pada beberapa kriteria.

3. Peringkat BIRU: Perusahaan meraih nilai minimal dalam kinerja lingkungan, yang berarti seluruh kriteria dipenuhi sesuai persyaratan.
4. Peringkat HIJAU: Perusahaan meraih kinerja lingkungan yang lebih unggul dari persyaratan dalam hal biodiversitas, *Environmental Management System (EMS)*, efisiensi energi dan pengurangan emisi, konsep 3R bagi limbah dan penurunan pencemaran air.
5. Peringkat EMAS: Perusahaan meraih kinerja lingkungan yang lebih unggul dari persyaratan baik secara lingkungan maupun sosial, dengan memberikan nilai bersama pada masyarakat secara kontinyu.

5.6 Pengukuran Kinerja Lingkungan Berdasarkan Standar GRI

Standar GRI adalah pedoman yang memungkinkan organisasi untuk melaporkan kepada publik akan dampak aktivitasnya secara sistematis dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan. Terdapat beberapa aspek lingkungan yang tercakup dalam Standar GRI diantaranya adalah sebagai berikut:

5.6.1 Aspek Material dan Pengukurannya

Isu utama terkait dengan material adalah efisiensi dalam penggunaan material yang tidak terbarukan (dalam konteks ini tidak dapat diperbarui dalam periode singkat, seperti mineral, logam, dan bahan bakar fosil) serta peningkatan pada penggunaan material terbarukan, material dengan input daur ulang, dan material yang digunakan kembali. Aspek material sangat terkait dengan konsep ekonomi sirkuler yang menekankan penggunaan kembali material sebagai bahan baku proses produksi sehingga meminimalisir proses ekstraksi material tidak terbarukan dan mencegah timbulan limbah. Standar GRI mengatur organisasi untuk melaporkan kinerja lingkungan berikut terkait dengan bahan atau material:

1. Pengelolaan material
2. Material yang digunakan, yaitu total material yang digunakan untuk produksi dan pengemasan produk dan jasa

utama, yang terdiri dari (1) material tak terbarukan (2) material terbarukan.

3. Material input dari daur ulang yang digunakan, yang dihitung dalam bentuk persentase menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Total material input daur ulang yang digunakan}}{\text{Total material input yang digunakan}} \times 100$$

Gambar 5.7. Rumus Material Input Daur Ulang
(Sumber : Standar GRI 2021)

4. Produk *reclaimed* (yang diperoleh kembali) dan material kemasannya, dalam bentuk persentase yang dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Produk reclaimed dan material kemasannya dalam periode pelaporan}}{\text{Produk terjual dalam periode pelaporan}} \times 100$$

Gambar 5.8. Rumus produk dan kemasan *reclaimed*
(Sumber : Standar GRI 2021)

5.6.2 Aspek Energi dan Pengukurannya

Isu utama terkait dengan energi adalah efisiensi pada penggunaan energi dari sumber tidak terbarukan dan peningkatan penggunaan sumber energi baru terbarukan. Aspek energi berkaitan erat dengan emisi GRK yang dihasilkan, sehingga penggunaan energi perlu direncanakan dan dikendalikan. Standar GRI mengatur organisasi untuk melaporkan kinerja lingkungan berikut terkait energi:

1. Pengelolaan energi
2. Konsumsi energi didalam organisasi, yang diperoleh melalui rumus berikut:

$$\text{Bahan bakar tak terbarukan yang dikonsumsi} + \text{bahan bakar terbarukan yang dikonsumsi} + \text{Listrik, pemanasan, pendinginan, dan uap yang dibeli untuk konsumsi} + \text{Listrik, pemanasan, pendinginan, dan uap yang dihasilkan sendiri, yang tidak dikonsumsi} - \text{Listrik, pemanasan, pendinginan, dan uap yang dijual (dalam joule atau kelipatannya).}$$

Gambar 5.9. Rumus Konsumsi Energi
(Sumber : Standar GRI 2021)

3. Konsumsi energi di luar organisasi yang mencakup aktivitas pada hulu dan hilir (dalam joule atau kelipatannya).
4. Intensitas energi, yang dihitung dengan membagi konsumsi energi mutlak dan metrik khusus organisasi.
5. Pengurangan konsumsi energi sebagai akibat langsung dari program efisiensi dan konservasi energi (dalam joule atau kelipatannya).
6. Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa (dalam joule atau kelipatannya).

5.6.3 Aspek Emisi dan Pengukurannya

Isu utama terkait emisi GRK adalah dampaknya terhadap perubahan iklim, salah satunya adalah pemanasan global. Paris Climate Agreement Tahun 2015 telah mengatur target bersama secara global akan tercapainya *Net Zero Emission* di Tahun 2060. Untuk itu, diperlukan strategi terkait energi dan emisi untuk mencapai NZE 2060. Standar GRI mengatur organisasi melaporkan kinerja lingkungan berikut terkait emisi:

1. Pengelolaan emisi
2. Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Cakupan 1) Langsung dalam metrik ton setara CO₂.
3. Emisi Energi Gas Rumah Kaca/GRK (Cakupan 2) Tidak Langsung dalam metrik ton setara CO₂.
4. Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (Cakupan 3) Tidak Langsung lainnya dalam metrik ton setara CO₂.
5. Intensitas emisi GRK.
6. Pengurangan emisi GRK dalam metrik ton setara CO₂.
7. Emisi Zat Perusak Ozon (ODS) dalam metrik ton setara triklorofluorometana (CFC-11).
8. Nitrogen oksida (NO_x), belerang oksida (SO_x), dan emisi udara lainnya yang signifikan

5.6.4 Aspek Limbah dan Pengukurannya

Isu utama limbah adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keanekaragaman hayati dan keselamatan dan kehidupan spesies di bumi, termasuk manusia.

Standar GRI mengatur organisasi untuk melaporkan kinerja lingkungan berikut terkait limbah:

1. Pengelolaan limbah
2. Timbulan limbah dalam metrik ton serta dampaknya
3. Manajemen dampak material terkait limbah
4. Limbah yang ditimbulkan
5. Limbah yang dialihkan dari TPA dalam metrik ton
6. Limbah yang dikirimkan ke TPA dalam metrik ton

5.6.5 Aspek Air dan Pengukurannya

Isu utama terkait air adalah pencemaran pada badan air sehingga mengancam kehidupan di laut dan di darat karena air adalah sumber kehidupan. Selain itu, saat ini terjadi isu kekeringan air (*water stress*) yang akan mengganggu kualitas hidup banyak orang. Sehingga, pengelolaan air perlu mendapatkan perhatian khusus. Standar GRI mengatur organisasi melaporkan kinerja lingkungan berikut terkait air:

1. Pengelolaan air
2. Interaksi dengan air (sumber daya bersama)
3. Manajemen dampak pembuangan air
4. Pengambilan air (dalam megaliter) berdasarkan sumber dan total padatan terlarutnya.
5. Pengambilan air (dalam megaliter) berdasarkan tujuan pembuangan dan total padatan terlarutnya.
6. Konsumsi air (dalam megaliter)

5.6.6 Keanekaragaman Hayati

Isu utama dalam keanekaragaman hayati adalah terganggunya aspek keanekaragaman hayati akibat aktivitas manusia. Standar GRO mengatur organisasi melaporkan kinerja lingkungan berikut terkait keanekaragaman hayati:

1. Pengelolaan biodiversitas
2. Lokasi operasi yang berdekatan dengan kawasan konservasi atau kawasan dengan nilai biodiversitas tinggi
3. Dampak material kegiatan operasi pada biodiversitas
4. Habitat yang dilindungi dan yang dipulihkan

5. Spesies dilindungi (yang terdaftar dalam daftar internasional, misalnya Daftar Merah IUCN atau daftar nasional)

5.6.7 Penilaian Lingkungan Supplier

Pengelolaan lingkungan yang baik mensyaratkan pengelolaan lingkungan di sepanjang rantai pasok. Standar GRI mengatur organisasi melaporkan kinerja lingkungan berikut terkait pemantauan supplier terkait lingkungan:

1. Pengelolaan penilaian lingkungan supplier
2. Seleksi supplier baru berdasarkan kriteria lingkungan, dalam bentuk persentase
3. Dampak lingkungan tidak menguntungkan (negatif) di sepanjang rantai pasok dan tindakan yang telah diambil

Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap Laporan Keberlanjutan, organisasi dapat melakukan penjaminan secara eksternal yang dipilih secara independen sehingga dapat mempublikasikan kesimpulan yang objektif dan tidak berpihak tentang pelaporan keberlanjutan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Global Reporting Initiatives. 2021. *GRI Standard 2021*. Amsterdam: Global Reporting Initiatives.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2014 Terkait Baku Mutu Air Limbah*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016 Terkait Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 Terkait Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Terkait Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Terkait Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pemerintah Pusat Republik Indonesia.

BAB 6

INVESTASI BERKELANJUTAN

Oleh Arnadi Chairunnas

6.1 Pendahuluan

Investasi berkelanjutan mendeskripsikan mengenai pentingnya pengalokasian sumber daya ke dalam proyek-proyek dan aset-aset. Hal ini tentunya bukan hanya memberikan benefit secara finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial dan dampak terhadap lingkungan. Investasi berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan *value* baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan tetap memperhitungkan variabel ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui tulisan ini, diharapkan para pemangku kepentingan dapat mengetahui dasar-dasar investasi berkelanjutan dan merespon dengan dukungan dengan cara memberikan sumber daya yang memadai guna mendukung investasi berkelanjutan secara holistik.

6.2 Defenisi Investasi Berkelanjutan

Investasi berkelanjutan atau biasa dikenal dengan istilah “***sustainable investment***” merujuk pada praktik dalam berinvestasi yang mempertimbangkan keuntungan secara finansial jangka pendek, dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola Perusahaan (Dorfleitner, 2015). Tujuan utama dari investasi berkelanjutan adalah mencapai ekuivalensi antara keuntungan finansial, tanggung jawab sosial, dan dampak lingkungan.

Berikut merupakan elemen utama pada investasi berkelanjutan:

1. Lingkungan (*Environment*)

Investasi berkelanjutan tidak lepas dari dampak ekologi dan lingkungan perusahaan atau proyek investasi. Ini mencakup pertimbangan terhadap kondisi tertentu, seperti perubahan

iklim, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan.

2. Sosial (*Social*)

Faktor sosial melibatkan aspek-aspek seperti hak asasi manusia, kondisi kerja, keberagaman suku dan budaya, kesetaraan gender, dan dampak sosial positif pada komunitas local di suatu daerah.

3. Tata Kelola Perusahaan (*Governance*)

Aspek tata kelola perusahaan tentunya mencakup proses pengelolaan perusahaan secara menyeluruh. Tentunya hal ini juga melingkupi kebijakan korporasi, etika bisnis, transparansi, dan akuntabilitas.

6.3 Jenis Investasi Berkelanjutan

Investasi berkelanjutan mencakup berbagai jenis instrumen keuangan yang dibuat dengan tujuan pencapaian keuangan sekaligus memperhatikan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG). Berikut adalah beberapa jenis investasi berkelanjutan yang biasa dikenal, yaitu:

1. Obligasi Hijau (*Green Bonds*)

Obligasi ini diterbitkan oleh entitas pemerintah, lembaga keuangan, atau perusahaan untuk mendanai proyek-proyek yang memberikan dampak positif pada lingkungan. Dana yang diperoleh dari penjualan obligasi ini digunakan untuk proyek-proyek seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan proyek-proyek ramah lingkungan lainnya.

2. Saham Berkelanjutan (*Sustainable Stocks*)

Saham perusahaan yang memiliki praktik bisnis berkelanjutan dan memenuhi kriteria ESG. Investor mencari saham-saham ini sebagai bagian dari strategi portofolio yang lebih berkelanjutan.

3. Dana Investasi Berkelanjutan (*Sustainable Mutual Funds/ETFs*)

Dana investasi ini ditujukan khusus pada saham-saham atau obligasi-obligasi yang telah memenuhi kriteria ESG. Investor dapat berinvestasi dalam dana ini untuk mendiversifikasi

- portofolio mereka dengan mempertimbangkan faktor keberlanjutan.
4. Obligasi Sosial (*Social Bonds*)
Sama seperti obligasi hijau, obligasi sosial diterbitkan untuk mendanai proyek-proyek dengan dampak sosial positif, seperti proyek-proyek pendidikan, perumahan sosial, atau layanan kesehatan masyarakat yang bisa diakses.
 5. Investasi Berbasis Nilai (*Values-Based Investing*):
Ini melibatkan pemilihan investasi berdasarkan nilai-nilai pribadi atau etika investor. Ini bisa termasuk menghindari investasi dalam industri tertentu atau memilih untuk mendukung perusahaan-perusahaan dengan prinsip-prinsip tertentu.
 6. Investasi Pengembangan Berkelanjutan (*Impact Investing*)
Fokusnya adalah pada investasi yang secara langsung menyumbang pada solusi permasalahan sosial atau lingkungan, sambil mencapai pengembalian finansial. Contohnya termasuk investasi dalam perusahaan-perusahaan sosial atau proyek-proyek pembangunan berkelanjutan.
 7. Dana Pensiun Berkelanjutan (*Sustainable Pension Funds*)
Dana pensiun dan reksa dana pensiun yang mengadopsi pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan portofolio investasinya.
 8. Instrumen Keuangan Berkelanjutan Lainnya
Selain obligasi dan saham, ada berbagai instrumen keuangan lain yang dikembangkan dengan fokus pada keberlanjutan, termasuk derivatif keuangan dan produk-produk struktural berkelanjutan.

Investasi berkelanjutan terus berkembang, dan semakin banyak produk keuangan yang dirancang untuk memenuhi permintaan investor yang peduli dengan keberlanjutan. Keputusan untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen ini sangat tergantung pada tujuan keuangan dan nilai-nilai pribadi investor.

6.4 Fungsi Investasi Berkelanjutan

Investasi berkelanjutan memiliki beberapa fungsi yang mencakup tujuan keuangan jangka panjang dan dampak positif pada lingkungan, sosial, serta tata kelola perusahaan. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari investasi berkelanjutan:

1. Menghasilkan Pengembalian Keuangan

Meskipun aspek keberlanjutan menjadi fokus utama, investasi berkelanjutan tetap bertujuan untuk menghasilkan pengembalian keuangan yang kompetitif. Investor berharap bahwa perusahaan atau proyek yang mempraktikkan keberlanjutan juga dapat memberikan hasil finansial yang baik.

2. Diversifikasi Portofolio

Investasi berkelanjutan memberikan opsi diversifikasi portofolio. Dengan menambahkan aset-aset yang berfokus pada ESG, investor dapat meminimalkan risiko portofolio mereka dengan mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang positif.

3. Mendorong Perusahaan untuk Bertindak Berkelanjutan

Melalui investasi berkelanjutan, investor memiliki kekuatan untuk memengaruhi perilaku perusahaan. Dengan menanamkan modal dalam perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip ESG, investor dapat mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.

4. Responsibilitas Sosial dan Lingkungan

Investasi berkelanjutan membantu memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan investor terhadap masyarakat dan planet ini. Dengan memilih investasi yang memperhatikan faktor ESG, investor berpartisipasi dalam upaya untuk meningkatkan keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat.

5. Menangkap Peluang Pasar Baru

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global tentang keberlanjutan, ada peluang untuk pertumbuhan di sektor-sektor yang berfokus pada solusi berkelanjutan. Investor berkelanjutan dapat memanfaatkan peluang ini untuk berinvestasi dalam perusahaan atau proyek yang

- mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.
6. **Mengelola Risiko Jangka Panjang**
Dengan mempertimbangkan aspek ESG, investor dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko jangka panjang yang mungkin muncul, seperti risiko peraturan, risiko reputasi, atau risiko yang terkait dengan perubahan iklim.
 7. **Memberikan Dukungan kepada Perusahaan Berkelanjutan**
Investasi berkelanjutan memberikan dukungan finansial kepada perusahaan-perusahaan yang memimpin dalam praktik bisnis berkelanjutan. Ini membantu mendorong kompetisi positif di antara perusahaan untuk meningkatkan standar ESG mereka.
 8. **Pengaruh pada Praktik Industri**
Melalui investasi berkelanjutan, investor dapat memainkan peran penting dalam mengubah praktik industri secara keseluruhan. Dengan menuntut tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan, investor dapat membentuk standar industri yang lebih baik.

Investasi berkelanjutan, ketika dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tidak hanya akan memberikan pengembalian finansial, tetapi juga berperan penting dalam membentuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan berdampak positif.

6.5 Strategi dalam Investasi Berkelanjutan

Strategi investasi berkelanjutan didasarkan pada pendekatan yang mempertimbangkan tidak hanya keuntungan finansial tetapi juga dampak sosial dan lingkungan. Berikut adalah beberapa strategi investasi berkelanjutan yang dapat diambil:

1. **Integrasi ESG dalam Proses Keputusan**
Analisis Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) yaitu melibatkan penilaian mendalam terhadap faktor-faktor ESG dalam analisis keputusan investasi. Proses integrasi ini tentunya dengan memperhatikan Skor ESG yang dimiliki.

Skor ESG digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan atau proyek dari perspektif lingkungan, sosial, dan tata Kelola (Chandra, 2022).

2. Diversifikasi Portofolio Berkelanjutan

Strategi ini dilakukan dengan menyesuaikan portofolio dengan sektor-sektor yang dianggap berkelanjutan, seperti energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, atau perusahaan dengan praktik tata kelola yang baik. Selain itu, indeks berkelanjutan juga memainkan peran untuk menginvestasikan dalam dana indeks atau Exchange-Traded Funds (ETF) yang memilih perusahaan berdasarkan kriteria berkelanjutan.

3. *Engagement* dan Voting Pemegang Saham

Strategi pada tingkatan ini yaitu dengan berpartisipasi dalam Rapat Pemegang Saham. Pemegang saham dapat memanfaatkan hak mereka untuk berpartisipasi dalam rapat perusahaan dan menyuarakan keprihatinan mereka terkait isu-isu berkelanjutan. Pemegang saham juga dapat menggunakan hak voting untuk mendukung resolusi berkelanjutan dan tata kelola yang baik.

4. Thematic Investing

Strategi jenis ini berfokus pada tema-tema spesifik yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti investasi dalam air bersih, pendidikan, atau pangan berkelanjutan.

5. *Green Bonds* dan *Social Impact Bonds*

Jenis strategi ini implementasinya dengan cara berinvestasi dalam obligasi yang diterbitkan untuk mendukung proyek-proyek lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini akan berdampak positif sosial, seperti proyek pendidikan atau pemberdayaan masyarakat.

6. *Screening* dan *Negative Screening*

Screening yang dimaksud yaitu memilih investasi berdasarkan kriteria positif, seperti perusahaan yang memiliki praktik berkelanjutan atau memenuhi standar tertentu. Sedangkan *Screening* Negatif yaitu menghindari investasi dalam sektor-sektor atau perusahaan yang terlibat

dalam kegiatan yang dianggap merugikan, seperti senjata atau energi fosil.

7. Inovasi Finansial Berkelanjutan

Strategi ini dilakukan dengan mendorong pengembangan produk keuangan yang mendukung investasi berkelanjutan, seperti obligasi berkelanjutan atau sukuk hijau.

8. Pemantauan dan Pelaporan Kinerja Berkelanjutan

Strategi jenis ini dilakukan dengan cara memantau kinerja investasi dari segi finansial, sosial, dan lingkungan. Tahapan selanjutnya dengan melibatkan pelaporan yang transparan terkait dampak investasi terhadap ESG dan upaya pembangunan berkelanjutan.

Strategi investasi berkelanjutan dapat beragam dan kompleks, tergantung pada tujuan investor, toleransi risiko, dan nilai-nilai yang diutamakan. Pemilihan strategi yang sesuai dengan profil investasi dan tujuan jangka panjang investor. Tujuan jangka Panjang inilah yang akan menjadi kunci kesuksesan dalam investasi berkelanjutan.

6.6 Investasi Berkelanjutan di Indonesia

Investasi berkelanjutan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan perusahaan terhadap keberlanjutan. Beberapa perkembangan terkait investasi berkelanjutan di Indonesia melibatkan berbagai sektor, termasuk keuangan, energi, dan industri. Berikut adalah beberapa aspek investasi berkelanjutan di Indonesia:

1. Obligasi Hijau dan Sosial

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan obligasi hijau untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Selain itu, obligasi sosial digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang memiliki dampak sosial positif, seperti infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

2. Perusahaan Berkelanjutan

Banyak perusahaan di Indonesia mulai memperhatikan praktik bisnis berkelanjutan. Beberapa di antaranya telah mengadopsi kebijakan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) untuk meningkatkan kinerja berkelanjutan mereka dan memenuhi tuntutan pasar global.

3. Industri Energi Terbarukan

Dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, investasi dalam proyek-proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan hidro menjadi semakin penting.

4. Pasar Modal Berkelanjutan

Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki inisiatif untuk mengembangkan pasar modal berkelanjutan. BEI memperkenalkan indeks saham berkelanjutan, yang mencakup perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria ESG tertentu. Hal ini membantu mendorong perusahaan untuk meningkatkan praktik berkelanjutan mereka.

5. Inisiatif Pemerintah

Pemerintah Indonesia secara aktif terlibat dalam mempromosikan investasi berkelanjutan. Inisiatif-inisiatif seperti Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mencakup langkah-langkah untuk mengintegrasikan keberlanjutan dalam pembangunan nasional.

6. Pelatihan dan Kesadaran

Terdapat peningkatan kesadaran di kalangan investor, perusahaan, dan masyarakat umum tentang pentingnya investasi berkelanjutan. Pelatihan dan kampanye kesadaran diadakan untuk meningkatkan pemahaman tentang ESG dan mendorong partisipasi dalam investasi berkelanjutan.

7. Dukungan dari Lembaga Keuangan Internasional

Beberapa lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan lembaga keuangan multilateral lainnya, memberikan dukungan dan

pembiayaan untuk proyek-proyek berkelanjutan di Indonesia.

8. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Investasi berkelanjutan juga terlihat dalam proyek-proyek infrastruktur yang memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial serta mematuhi standar keberlanjutan.

Meskipun terdapat perkembangan positif, masih ada tantangan yang perlu diatasi, termasuk perluasan pemahaman ESG, pengembangan peraturan yang lebih ketat, dan meningkatkan transparansi pelaporan ESG. Namun, investasi berkelanjutan terus menjadi bagian penting dari peta jalan pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

6.7 Peluang dan Tantangan dalam Investasi Berkelanjutan

6.7.1 Peluang Investasi Berkelanjutan

1. Pertumbuhan Sektor Berkelanjutan

Investasi dalam sektor-sektor seperti energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, dan pertanian berkelanjutan dapat memberikan peluang pertumbuhan yang signifikan.

2. Inovasi dan Teknologi

Investasi dalam perusahaan yang berfokus pada inovasi dan teknologi berkelanjutan dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang.

3. Permintaan Konsumen

Kenaikan kesadaran konsumen terhadap produk dan layanan berkelanjutan membuka peluang bagi perusahaan yang mampu memenuhi permintaan ini.

4. Green Bonds dan Obligasi Sosial

Penerbitan dan investasi dalam green bonds dan obligasi sosial memberikan peluang untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan.

5. Dukungan Regulasi

Regulasi yang mendukung praktik bisnis berkelanjutan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi berkelanjutan.

6. Kesempatan untuk Peningkatan Efisiensi Operasional
Perusahaan yang mengadopsi praktik berkelanjutan dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi risiko jangka panjang.
7. Investasi Sosial
Investasi dalam proyek-proyek yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat, seperti pendidikan atau pemberdayaan perempuan, dapat memberikan keuntungan finansial dan sosial.

6.7.2 Tantangan Investasi Berkelanjutan

1. Ketidakpastian Politik dan Hukum
Ketidakpastian politik dan perubahan regulasi dapat menciptakan risiko tambahan bagi investor dalam hal penanaman investasi secara berkelanjutan.
2. Keterbatasan Data dan Standarisasi
Keterbatasan data yang konsisten dan standarisasi dalam pelaporan ESG dapat membuat analisis dan pemantauan kinerja berkelanjutan menjadi lebih sulit.
3. Biaya Awal yang Tinggi
Beberapa investasi berkelanjutan, seperti energi terbarukan, mungkin memerlukan biaya awal yang tinggi sebelum mencapai tingkat pengembalian yang signifikan.
4. Kesulitan Pengukuran Dampak Sosial
Pengukuran dampak sosial dari investasi dapat menjadi kompleks dan sulit didefinisikan dengan jelas.
5. Tantangan untuk Mengubah Model Bisnis
Beberapa perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengubah model bisnis mereka untuk memenuhi standar berkelanjutan.
6. Risiko Perubahan Iklim
Perubahan iklim dapat menyebabkan risiko ekonomi dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja investasi berkelanjutan.
7. Tantangan Integrasi ESG
Integrasi faktor ESG ke dalam proses pengambilan keputusan dan praktik bisnis mungkin memerlukan perubahan budaya organisasi.

8. Greenwashing

Generasi milenial seringkali menunjukkan minat dalam hal investasi berkelanjutan (Herlan, 2023). Risiko greenwashing, di mana beberapa perusahaan mungkin membuat klaim palsu atau menyesatkan tentang praktik berkelanjutan mereka, dapat membingungkan investor.

Investasi berkelanjutan menghadapi sejumlah tantangan, tetapi dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, peluang untuk menciptakan dampak positif baik secara finansial maupun sosial dapat menjadi kenyataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryoso, H., & Santi, F. . 2023. MILENIAL DAN INVESTASI BERKELANJUTAN: MENGHINDARI JEBAKAN GREENWASHING. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 12(04), 1175-1184.
- Chandra, J. A. C., & Sacipto, R. 2022. Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Praktik Greenwashing Dalam Strategi Investasi Keuangan Berkelanjutan Berbasis ESG. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2), 138-146.
- Dorfleitner, G., Halbritter, G. and Nguyen, M. 2015. "Measuring the level and risk of corporate responsibility – An empirical comparison of different ESG rating approaches", *Journal of Asset Management*, Vol. 16 No. 7, pp. 450-466.
- <https://www.schroders.com/id-id/id/investasi-reksadana/insights/tiga-komponen-penting-dari-investasi-berkelanjutan/> Diakses 27 November 2023, Pukul 10.00 WIB

BAB 7

INOVASI BERKELANJUTAN

Oleh Fenny Marietza

7.1 Pendahuluan

Berkembangnya kondisi perekonomian dan bisnis saat ini membuat tantangan bagi organisasi untuk memenuhi harapan pelanggan, menavigasi transformasi digital, dan mengurangi berbagai risiko. Agar tetap kompetitif, perusahaan harus memprioritaskan inovasi dan terus beradaptasi dengan pergeseran seismik ini. Namun, kunci keberhasilan jangka panjang tidak hanya terletak pada inovasi tetapi juga pada inovasi berkelanjutan. Perusahaan yang menguasai esensi inovasi berkelanjutan lebih mungkin untuk memberikan nilai ekonomi terobosan dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Pada bagian ini, kita akan mengeksplorasi konsep inovasi berkelanjutan, pentingnya dalam dunia bisnis saat ini, dan langkah-langkah penting untuk mencapai kinerja inovasi yang unggul.

7.2 Definisi Inovasi Berkelanjutan Dalam Akuntansi

Inovasi dikaitkan dengan keberhasilan membawa produk atau layanan baru dan terbukti ke pasar, menghasilkan adopsi konsumen dan, dengan itu, profitabilitas. Namun, orang terkadang bingung apa (seperti dalam produk, layanan, atau aplikasi baru atau yang disempurnakan) dengan bagaimana (seperti dalam proses mengembangkan dan membawa produk baru ke pasar). Banyak orang juga bingung antara penemuan dan inovasi. Penemuan mendahului inovasi. Inovasi adalah proses menguji hipotesis atau membuat prototipe ide baru, sedangkan inovasi adalah proses mengubah inovasi menjadi solusi yang dianut secara luas (Beausoleil, 2022).

Inovasi berkelanjutan akuntansi mencakup penciptaan fungsi-fungsi baru dalam perangkat lunak akuntansi, praktik akuntansi berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta peran akuntansi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Beberapa contoh inovasi akuntansi berkelanjutan termasuk penggunaan informasi keuangan dan non-keuangan untuk memantau dan melaporkan kinerja perusahaan secara holistik, dengan mempertimbangkan konsekuensi sosial, lingkungan, dan ekonomi organisasi. Selain itu, akuntansi dapat berperan dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan mendorong investasi jangka panjang di bidang infrastruktur dan inovasi. Akibatnya, inovasi akuntansi yang berkelanjutan memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan menjaga keadaan lingkungan (Khairin, 2020)

Pentingnya inovasi berkelanjutan dalam akuntansi

Beberapa aspek pentingnya inovasi berkelanjutan dalam akuntansi terdiri dari:

1. Akuntansi berkelanjutan dapat mendukung inovasi bisnis dan menjaga kondisi bumi di masa yang akan datang.
2. Inovasi dalam akuntansi akan mengintegrasikan berbagai elemen untuk mencapai transformasi keuangan dan meningkatkan kinerja perusahaan.
3. Membantu perusahaan mengoptimalkan proses, efisiensi dan kualitas produk atau layanan
4. Inovasi dalam akuntansi juga berkaitan dengan pengembangan bisnis yang fokus pada pelanggan, manajemen keuangan dan tanggung jawab sosial

7.3 Tantangan Inovasi Berkelanjutan Saat Ini Dalam Akuntansi

"Akuntansi lingkungan" mencakup lebih dari sekadar menghitung manfaat dan pengeluaran lingkungan. Ini adalah proses akuntansi untuk setiap biaya dan manfaat yang dihasilkan dari perubahan produk atau operasi perusahaan, di mana perubahan tersebut juga melibatkan perubahan konsekuensi lingkungan. Peningkatan akuntansi untuk biaya dan

keuntungan non-lingkungan seperti harga input, permintaan pelanggan, dan sebagainya dapat menghasilkan perubahan dalam pengambilan keputusan yang memiliki dampak lingkungan. Sistem akuntansi lingkungan yang komprehensif harus memperhitungkan total biaya lingkungan dan memasukkan biaya lingkungan ke dalam penganggaran modal, alokasi biaya, desain proses / produk, dan pilihan jangka panjang lainnya. Saat ini, sebagian besar informasi perusahaan dan platform pengambilan keputusan tidak mendukung pengambilan keputusan proaktif dan masa depan (USEPA, 1995).

Akuntansi lingkungan (EA) dipandang sebagai suplemen penting oleh eksekutif bisnis dan pendukung lingkungan untuk meningkatkan pengambilan keputusan lingkungan di sektor swasta. Apakah tujuannya adalah penghindaran polusi atau konsep yang lebih luas dari "keberlanjutan perusahaan," ada keyakinan umum bahwa akuntansi lingkungan yang kompeten akan membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan menerapkan kemajuan lingkungan yang layak secara komersial. Selain itu, peraturan lingkungan bergeser ke arah kebijakan publik yang jauh lebih bergantung pada pengumpulan dan pelaporan data lingkungan. Semakin banyak literatur mendokumentasikan praktik akuntansi yang tidak pantas yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan lingkungan (USEPA, 1995). Kegagalan untuk memperhitungkan kewajiban kontinjensi di masa depan, serta kegagalan untuk mengukur dampak biaya lingkungan, sering menjadi sasaran kritik.

Alokasi pengeluaran lingkungan untuk akun overhead umum, kegagalan untuk memperhitungkan kewajiban kontinjensi di masa depan, dan kegagalan untuk mengukur dampak kebijakan lingkungan pada citra perusahaan dan hubungan pelanggan dan pemasok sering menjadi sasaran kritik. Akuntansi lingkungan yang buruk, dari sudut pandang kebijakan publik, berarti bahwa sektor swasta lebih cenderung "kehilangan" investasi, pengadaan, dan peluang desain proses dan produk dengan manfaat finansial dan lingkungan. Sering diasumsikan bahwa prosedur akuntansi lingkungan yang lebih

baik, bersama dengan tujuan ekonomi sektor swasta, akan menghasilkan keuntungan lingkungan yang besar. Sudut pandang ini telah memicu literatur yang berkembang tentang pendekatan keuangan dan akuntansi untuk meningkatkan proses akuntansi [Moilanen & Martin, 1996]. Ini adalah beberapa kesulitan sosial dan lingkungan yang dihadapi lingkungan.

Akuntansi mencatat peristiwa dalam organisasi, peristiwa yang dapat diverifikasi ditetapkan, dan peristiwa bisnis yang dapat dinyatakan dalam hal nilai moneter (Baricz & Roth, 2000) Mempertimbangkan pertimbangan lingkungan sangat sulit karena konsekuensi lingkungan sebagian besar terjadi di luar organisasi. Kejadian eksternal ini biasanya diinternalisasi melalui peraturan perundang-undangan, terlepas dari kenyataan bahwa asumsi bahwa perlindungan lingkungan menjadi faktor yang semakin penting dalam daya saing perusahaan tampaknya semakin dibenarkan (Schaltegger & Burritt, 2000) Akuntansi tradisional berfokus pada transaksi komersial sambil mengabaikan biaya sosial dan eksploitasi sumber daya alam.

Akuntansi tradisional memberikan lebih sedikit informasi tentang bagaimana aksi korporasi mempengaruhi lingkungan atau seberapa tinggi biaya sosial daripada akuntansi lingkungan. Alasan utama untuk ini adalah bahwa sumber daya alam tidak dipegang oleh korporasi dan, dengan demikian, tidak termasuk dalam laporan kondisi keuangan; Oleh karena itu, penyusutan tidak dapat dilaporkan (Schaltegger & Burritt, 2000). Tugas akuntansi yang paling penting adalah menawarkan informasi yang jujur dan adil kepada pemangku kepentingan sehingga mereka dapat membuat keputusan berdasarkan informasi (Baricz & Roth, 2000). Tujuan ini tidak dapat dicapai jika sistem dibangun di atas informasi yang tidak lengkap; Mengingat fungsi aslinya, akuntansi tradisional adalah sistem pernyataan standar yang tidak dapat mengukur dan menjelaskan jumlah sumber daya alam yang terbatas.

Akuntansi tradisional memprioritaskan laba dan tidak cukup mengatasi masalah lingkungan dan sosial. Ini menggunakan uang sebagai unit pengukuran standar dan pada

dasarnya nilai pada nilai sebelumnya, yang tidak selalu memberikan data yang sebanding dan terkini. Selain pengambil keputusan internal, pemegang kepentingan eksternal seperti otoritas pemerintah, organisasi lain, pembeli, dan bank juga memperluas permintaan mereka akan informasi akuntansi lingkungan. Akuntansi tradisional tidak dapat memberikan informasi yang tepat kepada pemangku kepentingan internal atau eksternal tentang efektivitas keuangan kegiatan lingkungan. Untuk menawarkan informasi tentang kinerja lingkungan organisasi, data yang tepat diperlukan, yang sering diperoleh melalui informasi yang dinyatakan dalam unit fisik. Kadang-kadang perlu untuk mempelajari proses input-output atau volume output yang dinyatakan dalam unit material, yang tidak termasuk dalam akuntansi manajemen yang khas, terutama untuk faktor lingkungan (Jones, 2010).

7.4 Peran Inovasi Berkelanjutan Dalam Akuntansi

Peran inovasi dalam mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam praktik akuntansi sangat penting. Inovasi juga mencakup adopsi akuntansi triple bottom line untuk pengukuran kinerja holistik dan penggunaan teknologi serta analisis data untuk pelaporan yang berkelanjutan.

Integrasi faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam praktik akuntansi

Beberapa integrasi faktor-faktor ESG dalam akuntansi terdiri dari:

1. Keberlanjutan lingkungan: integrasi faktor ESG yang pertama adalah memasukkan aspek lingkungan dalam akuntansi untuk mengukur dampak perusahaan terhadap lingkungan sekitar.
2. Tata kelola yang baik: dengan menekankan tata kelola yang baik dalam praktik akuntansi
3. Kesejahteraan sosial: memperhitungkan kontribusi sosial perusahaan dalam akuntansi

Adopsi akuntansi triple bottom line untuk pengukuran kinerja holistik

Akuntansi triple bottom line merupakan metode yang mendorong permasalahan dan tekanan sosial kearah ekonomi dan mengubah perilaku perusahaan melalui tekanan institusional yang terdiri dari:

1. Keuntungan ekonomi, yaitu pengukuran kinerja keuangan dari perspektif inovasi berkelanjutan.
2. Dampak Sosial, yaitu pencapaian perusahaan terhadap kesejahteraan sosial sebagai indikator kesuksesan perusahaan.
3. Preservasi lingkungan, yaitu pengelolaan risiko dan dampak lingkungan sebagai bagian dari perhitungan kinerja perusahaan

Penggunaan teknologi dan analisis data untuk pelaporan dan pengambilan keputusan yang berkelanjutan

Penggunaan teknologi dan analisis data dalam pelaporan akuntansi yang berdampak pada pengambilan keputusan dengan melakukan :

1. Transformasi digital dalam mempercepat pelaporan dan analisis data
2. Pemanfaatan big data dalam mengukur dampak keberlanjutan perusahaan dan
3. Pelaporan yang interaktif untuk mempermudah pengambilan keputusan berkelanjutan.

Pengukuran kinerja holistik

Inovasi dalam akuntansi dalam pengukuran kinerja adalah dengan mengintegrasikan ESG dalam pengukuran kinerja, menjadikan pengukuran sosial sebagai bagian kinerja holistic perusahaan dan memastikan transparansi dalam pelaporan kinerja holistic perusahaan.

7.5 Praktik Terbaik Untuk Inovasi Berkelanjutan Dalam Akuntansi

Implementasi kerangka pelaporan ESG (misalnya, Global Reporting Initiative, Sustainability Accounting Standards Board)

ESG (Environmental, Social and Governance) adalah konsep yang menggambarkan tiga aspek kunci dalam bisnis. Environmental atau lingkungan adalah konsep bagaimana perusahaan mempengaruhi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar termasuk mengurangi emisi karbon, mengelola limbah dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang ada.

Social atau sosial adalah konsep bagaimana perusahaan berinteraksi dengan masyarakat, termasuk kepada karyawannya, kualitas produk atau layanan, serta dukungan terhadap komunitas dan inisiatif sosial. Terakhir adalah governance atau tata kelola yang merupakan etika perusahaan, transparansi dalam pengambilan keputusan, kepatuhan hukum dan praktik tata kelola yang baik (<https://environment-indonesia.com/esg-framework-dan-implementasinya-dalam-bisnis>).

Terdapat berbagai kerangka kerja yang digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia. Di bawah ini beberapa contoh kerangka kerja yang umum digunakan:

1. *Global Reporting Initiative (GRI)*

GRI adalah salah satu kerangka kerja pelaporan ESG yang paling dikenal dan banyak digunakan. GRI membantu perusahaan mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan dampak ESG mereka. Kerangka kerja ini memiliki panduan yang sangat komprehensif untuk melaporkan berbagai aspek dan telah menjadi standar industri.

2. *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*

SASB adalah organisasi yang mengembangkan standar ESG untuk sektor industri tertentu. Mereka menyediakan panduan yang spesifik untuk berbagai sektor ekonomi, membantu perusahaan mengidentifikasi faktor ESG yang paling relevan dalam bisnis mereka.

3. *United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)*

SDGs adalah sekelompok tujuan global yang ditetapkan oleh PBB untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan.

Banyak perusahaan menggunakan SDGs sebagai panduan dalam mengintegrasikan ESG dalam strategi bisnis mereka dan berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

4. *Carbon Disclosure Project (CDP)*

CDP adalah platform yang membantu perusahaan melaporkan informasi terkait emisi karbon dan tindakan iklim mereka. Ini membantu perusahaan mengukur dampak lingkungan mereka dan bergerak menuju keberlanjutan yang lebih besar dalam hal karbon.

5. *Principles for Responsible Investment (PRI)*

PRI adalah inisiatif yang mendukung investor dalam mengintegrasikan faktor ESG dalam pengambilan keputusan investasi mereka. Ini mencakup enam prinsip yang memandu investor untuk mengintegrasikan ESG dalam praktik investasi mereka.

Implementasi dari ESG sendiri dimulai dari penetapan KPI (*key performance indicators*), integrasi dalam kebijakan dan prosedur dalam rantai pasokan, kebijakan sumber daya manusia dan pengelolaan risiko, keterlibatan pemangku kepentingan seperti investor, karyawan, pelanggan dan komunitas lokal untuk memahami kebutuhan mereka dan memasukkan mereka dalam strategi perusahaan, pelatihan internal, pengukuran dan pelaporan yang transparan dan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap praktik ESG dan identifikasi area dimana yang memerlukan perbaikan (<https://environment-indonesia.com/esg-framework-dan-implementasinya-dalam-bisnis>).

7.6 Manfaat Inovasi Berkelanjutan Dalam Akuntansi

Menurut Corrado, Haskel, Miranda, & Sichel (2020) penerapan inovasi berkelanjutan dalam praktik akuntansi dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Tiga manfaat utama dari inovasi berkelanjutan dalam akuntansi terdiri dari:

1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan: Praktik akuntansi berkelanjutan dapat

- meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelaporan keuangan. Dengan memperkenalkan standar dan metode akuntansi yang lebih jelas dan terukur, perusahaan dapat memberikan pemangku kepentingan dengan informasi lebih akurat dan terpercaya.
2. Peningkatan manajemen risiko melalui identifikasi risiko terkait ESG: Inovasi berkelanjutan dalam akuntansi dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG). Dengan memasukkan faktor-faktor ESG ke dalam proses akuntansi, perusahaan dapat secara proaktif mengurangi risiko dan memperkuat keberlanjutan bisnis mereka.
 3. Peningkatan reputasi dan nilai merek melalui praktik berkelanjutan: Perusahaan yang melakukan inovasi berkelanjutan dalam akuntansi dapat membangun reputasi yang kuat sebagai pemimpin dalam keberlanjutan. Praktik akuntansi berkelanjutan yang transparan dan bertanggung jawab dapat meningkatkan citra perusahaan dan nilai merek, membantu menarik investor dan menumbuhkan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan.

7.7 Tantangan dan Peluang di Masa Yang Akan Datang

Tantangan dari inovasi berkelanjutan dibidang akuntansi adalah melakukan transformasi ke arah praktik berkelanjutan yang seringkali membutuhkan perubahan budaya, metode kerja dan paradigma perusahaan. Beberapa tantangan lainnya yaitu ketidakpastian regulasi, kompleksitas pengukuran dampak lingkungan dan sosial, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan praktisi akuntansi

Prospek dimasa yang akan datang adalah dengan penerapan inovasi berkelanjutan dapat membuka pintu untuk mencapai keunggulan kompetitif dan meningkatkan reputasi perusahaan dan memenuhi tuntutan pelanggan. Teknologi canggih memanfaatkan teknologi baru, seperti kecerdasan

buatan dan analisis big data, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan inovasi berkelanjutan.

7.8 Kesimpulan

Inovasi berkelanjutan dalam akuntansi memberikan manfaat yang tidak hanya berguna bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat luas dan lingkungan. Dengan meningkatkan transparansi, mengelola risiko terkait ESG, dan membangun reputasi yang kuat, perusahaan dapat menciptakan keberlanjutan jangka panjang dan memberikan kontribusi positif terhadap dunia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Baricz, R., & Róth, J. 2006. Könyvviteltan (Accounting). Aula, Budapest.
- Beausoleil, A. M. 2022. Business Design Thinking and Doing: Frameworks, Strategies and Techniques for Sustainable Innovation. In *Business Design Thinking and Doing: Frameworks, Strategies and Techniques for Sustainable Innovation*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-86489-7>
- Relationships, I., & Relationships, I. (n.d.). *Accounting, Innovation and Inter-Organisational Relationships*.
- Corrado, C., Haskel, J., Miranda, J., & Sichel, D. 2020. Measuring and Accounting for Innovation in the Twenty-First Century. In *Measuring and Accounting for Innovation in the Twenty-First Century*. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226728209.001.0001>
- Arowoshegbe, A. O., & Uniamikogbo, E. 2016. Accounting for Social and Environmental Challenges: A Theoretical Perspective. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 1(3), 143–148. <https://doi.org/10.21276/sjbms.2016.1.3.10>
- Khan, P. A., Johl, S. K., & Akhtar, S. 2021. Firm Sustainable Development Goals and Firm Financial Performance through the Lens of Green Innovation Practices and Reporting: A Proactive Approach. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(12). <https://doi.org/10.3390/jrfm14120605>
- Moilanen, T., & Martin, C. 1996. Financial Evaluation of Environmental Investments (Houston, Tex.: Gulf Publishing).
- Schaltegger, S., & Burritt, R. L. 2000. Contemporary Environmental Accounting Issues, Concepts and Practice. UK: Greenleaf Publishing.

- Sridhar, K., & Jones, G. 2013. The three fundamental criticisms of the Triple Bottom Line approach: An empirical study to link sustainability reports in companies based in the Asia-Pacific region and TBL shortcomings. *Asian Journal of Business Ethics*, 2(1), 91-111. <https://doi.org/10.1007/s13520-012-0019-3>
- United States Environmental Protection Agency. 1995. An Introduction to Environmental Accounting as a Business Management Tool: Key Concepts and Terms, EPA 742-R-95 001 June.

BAB 8

PELAPORAN KEBERLANJUTAN DAN TRANSPARANSI

Oleh Sasmita Nabila Syahrir

8.1 Pendahuluan

Laporan keberlanjutan merupakan hal penting oleh suatu entitas yang digunakan sebagai alat komunikasi kinerja perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan. Transparansi menjadi pondasi utama dalam membangun kesuksesan dan kepercayaan suatu perusahaan, ditengah meningkatnya kesadaran mengenai isu-isu lingkungan dan sosial, dan praktik bisnis yang berkelanjutan semakin menjadi fokus utama bagi perusahaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan (POJK 51) mewajibkan perusahaan jasa keuangan untuk membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, dan melaporkannya setiap tahun.

Pelaporan keberlanjutan dapat mendorong transparansi dan mendorong pertumbuhan pasar. Pelaporan keberlanjutan adalah alat yang ampuh bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen entitas terhadap kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dengan mengkomunikasikan secara jelas upaya dan kemajuan entitas di bidang-bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan karyawan.

Kita ketahui, selain mengejar keuntungan, entitas harus berperan dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat, dan turut kontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan (Wijayanti, 2016).

Dalam bab ini, kita akan memahami lebih lanjut apa yang dimaksud dengan Pelaporan Keberlanjutan dan Transparansi

dan bagaimana manfaatnya bagi perusahaan dan pemangku kepentingan.

8.2 Definisi Pelaporan Berkelanjutan

Laporan keberlanjutan yaitu suatu laporan yang dirancang oleh suatu entitas atau perusahaan untuk memberikan gambaran kinerja entitas dalam berbagai aspek, yaitu aspek sosial, lingkungan dan ekonomi.

Laporan keberlanjutan juga berupa laporan nonkeuangan yang dibuat oleh suatu entitas dalam menyampaikan kemajuan suatu entitas dalam berbagai parameter keberlanjutan, termasuk aspek lingkungan, sosial dan tata kelola, serta risiko-risiko dan dampak yang kemungkinan terjadi pada saat ini atau di masa akan datang.

8.3 Definisi Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Loina Lalolo Krina P, 2003).

Transparansi data adalah prosedur agar data dapat diakses oleh semua orang. Hal ini sangat penting agar memungkinkan orang untuk membuat keputusan yang masuk akal, membantu suatu entitas dalam menjaga akuntabilitasnya dan menciptakan kepercayaan serta keandalan.

Ada banyak cara di mana transparansi data membantu menerapkan keberlanjutan. Salah satu cara krusialnya adalah menciptakan prosedur pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Sistem ini memungkinkan dunia usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan dampak berkelanjutannya dan melakukan perbaikan melalui peraturan yang tepat.

8.4 Pelaporan Berkelanjutan Dan Transparansi

Pelaporan berkelanjutan dan transparansi merupakan suatu pegangan yang membuktikan bahwa suatu organisasi atau suatu unit menjalankan operasinya dengan integritas dan

bertanggungjawab yang tinggi. Pelaporan berkelanjutan berkaitan dengan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dari kegiatan suatu entitas atau perusahaan. Di dalam bab ini, transparansi artinya memberikan informasi dengan jelas dan secara terbuka kepada pemangku kepentingan, contohnya seperti pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat umum.

Laporan berkelanjutan melibatkan hal-hal seperti praktik berkelanjutan, kebijakan lingkungan, proyek tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan upaya untuk mengurangi dampak lingkungan. Transparansi dalam pelaporan ini diartikan tidak hanya dalam memberikan informasi yang baik saja, tetapi juga pengakuan dan cara mengatasi tantangan ataupun kekurangan yang mungkin saja ada.

Pelaporan keberlanjutan dan transparansi merupakan faktor yang semakin penting bagi keberhasilan perusahaan. Perusahaan harus menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai ini dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kinerja sosial dan lingkungan entitasnya, jika ingin membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan sekaligus melihat peluang baru dalam suatu bisnis.

8.5 Tujuan Pelaporan Berkelanjutan Dan Transparansi

Pelaporan berkelanjutan dan transparansi memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut :

1. Informasi Pemangku Kepentingan

Entitas dapat memberikan informasi bagi pemangku kepentingan seperti pemegang saham, pemasok, dan masyarakat umum. Informasi ini dapat memudahkan pemangku kepentingan untuk mengetahui dan juga memahami tentang suatu entitas beroperasi dan turut serta terhadap berbagai aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi

stakeholder (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas yang dimaksud yaitu meningkatkan akuntabilitas dengan memberikan informasi mengenai praktik berkelanjutan, kinerja lingkungan, dan upaya tanggung jawab sosial entitas. Hal ini memudahkan suatu entitas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dan juga kritik, dan memberikan solusi atas tantangan yang kemungkinan akan terjadi.

3. Kepercayaan Dan Reputasi

Mendirikan kepercayaan dengan memberikan transparansi dan konsistensi dalam pelaporan. Hal ini dapat meningkatkan reputasi organisasi di mata pemangku kepentingan dan masyarakat umum.

4. Kepatuhan Dan Peraturan

Memenuhi persyaratan hukum dan peraturan terkait pelaporan keberlanjutan dan transparansi. Banyak negara dan lembaga pemerintah mengharuskan organisasi untuk menyediakan laporan tertentu terkait dampak mereka pada lingkungan dan masyarakat.

5. Inovasi Dan Efisiensi

Mendorong inovasi dan efisiensi dengan mendorong organisasi untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses bisnis mereka untuk mencapai tujuan keberlanjutan.

6. Perbaikan Kinerja

Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam kinerja organisasi. Dengan menyediakan data dan informasi yang terukur, organisasi dapat menilai dampak dari kebijakan dan praktik mereka, serta merancang strategi untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan.

7. Manajemen Risiko

Laporan berkelanjutan memudahkan entitas untuk mengatur risiko-risiko yang berhubungan dengan aspek sosial dan lingkungan. Dengan memberikan data juga informasi yang akurat, laporan berkelanjutan juga memudahkan entitas mengetahui potensi dampak negatif dari aktivitas bisnis entitas serta pengambilan keputusan untuk meminimalkan risiko yang ada.

8. Daya Tarik Investor

Dengan adanya laporan berkelanjutan, para investor semakin kuat dan juga tidak dilema dalam memberikan pilihan sebagai pengambilan keputusan yang tepat atas isi dari laporan berkelanjutan yang telah di berikan oleh entitas. Laporan berkelanjutan yang baik serta transparansi dapat meningkatkan daya tarik investor untuk suatu entitas pada suatu bisnis yang berkelanjutan.

Pada umumnya, pelaporan berkelanjutan dan transparansi mempunyai tujuan utama, yaitu menumbuhkan lingkungan yang lebih terbuka, bertanggungjawab dan berkelanjutan dalam praktik bisnis pada suatu entitas.

8.6 Akibat Tidak Adanya Laporan Berkelanjutan Dan Transparansi

Tanpa adanya laporan berkelanjutan dan transparansi, beberapa kemungkinan akan muncul, yaitu sebagai berikut :

1. Ketidakjelasan Pemahaman

Tanpa laporan yang menyediakan informasi terperinci, pemangku kepentingan mungkin memiliki pemahaman yang terbatas atau tidak akurat tentang dampak organisasi pada ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.

2. Kurangnya akuntabilitas

Tanpa transparansi, organisasi mungkin kurang akuntabel terhadap praktik-praktiknya. Ini dapat menyebabkan kurangnya insentif untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan atau mengatasi masalah yang mungkin timbul.

3. Kehilangan kepercayaan

Keterbukaan dan transparansi adalah kunci untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan. Tanpa laporan yang jelas, organisasi dapat kehilangan kepercayaan masyarakat dan pemegang saham.

4. Tidak memenuhi persyaratan hukum

Banyak yurisdiksi mengharuskan organisasi untuk memberikan laporan keberlanjutan sebagai bagian dari kewajiban hukum mereka. Tanpa pelaporan yang memadai,

organisasi dapat menghadapi sanksi atau konsekuensi hukum.

5. Kurangnya perbaikan dan inovasi

Tanpa pemantauan dan evaluasi terbuka, organisasi mungkin kurang termotivasi untuk melakukan perbaikan dan inovasi dalam keberlanjutan dan tanggung jawab social

6. Potensi tantangan hukum dan reputasi

Organisasi mungkin menghadapi risiko tantangan hukum atau serangan reputasi jika praktik-praktik yang tidak berkelanjutan atau tidak etis terungkap secara mendadak, tanpa adanya laporan yang merinci tindakan yang diambil untuk memperbaiki situasi tersebut.

8.7 Langkah-Langkah Membuat Laporan Berkelanjutan

Membuat laporan berkelanjutan melibatkan langkah-langkah tertentu untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai, akurat, dan relevan. Berikut adalah panduan umum untuk membuat laporan keberlanjutan :

1. Tentukan tujuan dan sasaran

Identifikasi tujuan laporan berkelanjutan Anda. Tetapkan sasaran yang spesifik dan ukurannya.

2. Identifikasi pemangku kepentingan

Kenali siapa yang akan membaca dan menggunakan laporan Anda. Pemangku kepentingan bisa termasuk investor, karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum.

3. Kumpulkan data

Kumpulkan data yang relevan dan signifikan untuk mencerminkan kinerja perusahaan Anda sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4. Gunakan metode pengukuran standar

Pastikan menggunakan metode pengukuran yang standar dan diakui secara internasional, terutama jika Anda ingin membandingkan kinerja Anda dengan perusahaan lain.

5. Sampaikan informasi dengan jelas

Hindari penggunaan istilah teknis yang sulit dimengerti. Sampaikan informasi dengan cara yang jelas dan mudah dicerna.

6. Gunakan informasi visual

Gunakan grafik, tabel, dan grafis lainnya untuk membantu menyajikan data secara visual dan mudah dipahami.

7. Jelaskan tindakan perbaikan dan rencana masa depan

Jelaskan langkah-langkah konkret yang telah diambil untuk meningkatkan kinerja, dan sertakan rencana masa depan untuk mencapai tujuan berkelanjutan.

8. Berikan konteks

Sertakan konteks yang relevan, seperti tren industri atau perbandingan dengan tahun sebelumnya, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja.

9. Dorong keterlibatan pemangku kepentingan

Ajak pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik dan berpartisipasi dalam proses perencanaan keberlanjutan.

10. Review dan verifikasi

Pastikan laporan Anda telah direview dan diverifikasi oleh pihak yang berkompeten untuk memastikan akurasi dan keandalan informasi.

8.8 Prinsip-Prinsip Pelaporan Berkelanjutan

Prinsip-prinsip utama laporan berkelanjutan dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan fokusnya. Namun, umumnya, beberapa prinsip umum yang sering muncul dalam laporan berkelanjutan melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Berikut beberapa prinsip umum laporan berkelanjutan :

1. Transparansi

Laporan berkelanjutan seharusnya transparan dalam memberikan informasi yang relevan dan akurat. Transparansi mencakup pengungkapan terbuka mengenai kebijakan, praktik, dan kinerja perusahaan.

2. Akuntabilitas

Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampaknya terhadap berbagai aspek, seperti lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan berkelanjutan seharusnya mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*)

3. Responsibilitas

Laporan berkelanjutan seharusnya mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap isu-isu keberlanjutan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi atau meminimalkan dampak negatif serta meningkatkan dampak positifnya.

4. Keterlibatan Stakeholders

Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan laporan berkelanjutan dapat meningkatkan validitas dan relevansi informasi yang disajikan. Pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat umum.

5. Kesenambungan

Laporan berkelanjutan seharusnya mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

6. Integrasi dan strategi bisnis

Informasi yang disajikan dalam laporan berkelanjutan seharusnya terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan. Ini mencakup bagaimana aspek-aspek keberlanjutan diintegrasikan ke dalam operasi dan pengambilan keputusan perusahaan.

7. Siklus laporan berkala

Laporan berkelanjutan biasanya memiliki siklus pelaporan berkala, seperti tahunan atau kuartalan, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu.

Prinsip-prinsip pelaporan keberlanjutan yang berkualitas menjadi pedoman para pemangku kepentingan sehingga dapat melihat aspek bidang lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik kedepannya. Kualitas informasi yang berkualitas juga membuat pemangku kepentingan untuk membuat penilaian

yang valid dalam suatu organisasi dalam entitas dan untuk mengambil tindakan yang tepat.

8.9 Kategori Pengungkapan Pelaporan Berkelanjutan

Dalam membuat pelaporan berkelanjutan harus memuat beberapa kategori, yaitu sebagai berikut :

- 1. Ekonomi** yang membahas aliran modal antara pemangku kepentingan yang berbeda dan dampak utama ekonomi dari sebuah organisasi di seluruh masyarakat.
- 2. lingkungan** dimana yang berhubungan dengan sistem alami yang hidup dan tak hidup, termasuk tanah, air, udara dan ekosistem.
- 3. sosial** yang menyangkut dampak organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi beroperasi. Dalam kategori sosial ini, ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian pada kategori sosial, yaitu :
 - a. Kepegawaian
Yang melibatkan hubungan tenaga kerja dan manajemen, kesehatan dan keselamatan kerja serta pelatihan untuk tenaga kerja.
 - b. Hak asasi manusia
Entitas harus memperhatikan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
 - c. Masyarakat
Pihak entitas harus memperhatikan dampak yang terjadi terhadap masyarakat sekitar di tempat mereka beroperasi.
 - d. Tanggung jawab atas produk
Pada kategori ini berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan dari pengguna produk dan pelanggan .
- 4. Kinerja keuangan**
Kinerja keuangan yang dimaksud adalah suatu pandangan untuk mengetahui suatu entitas dalam menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan yang sesuai standard dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*).

Secara keseluruhan, penting bagi entitas untuk selalu mengikuti perkembangan yang ada dalam transparansi dan pengungkapan keberlanjutan agar tidak tertinggal dalam persaingan, baik investasi dalam praktik berkelanjutan maupun ekspektasi pemangku kepentingan terus berkembang dengan pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi. 2014. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Earning Management: A Political Cost Perspective. Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kasmir, D. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada .
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. In Akuntansi Sektor Publik (1st ed.). Penerbit Andi.
- P. Loina Lalolo Krina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Jakarta : Salemba Empat.
- Wijayanti, R. Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

BAB 9

ASPEK ETIKA DALAM AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Oleh I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi

9.1 Pendahuluan

Globalisasi telah memperluas lingkup bisnis internasional dengan membuka pasar yang lebih luas dan memfasilitasi perdagangan internasional yang lebih cepat dan lebih efisien. Menurut Cavusgil (2008) dalam (Kartawinata et al., 2014), bisnis internasional adalah kegiatan perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta maupun pemerintah melintasi batas suatu negara dengan negara lainnya. Bisnis internasional dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan standar hidup suatu negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menambah lapangan kerja. Di samping itu, bisnis internasional juga mampu mendorong industrialisasi dan investasi perusahaan multinasional (Suryanto & Kurniati, 2022). Namun, keterbukaan dalam pasar internasional juga telah memunculkan tantangan baru dalam hal etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam melaksanakan bisnis internasional, perusahaan harus mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat lokal, lingkungan, dan ekonomi serta memastikan bahwa tanggung jawab sosialnya dapat dipenuhi. Saat ini, berbagai negara telah menuntut perusahaan untuk memiliki etika bisnis, serta menerapkan keberlanjutan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara konsisten dalam pelaksanaan bisnisnya (Handayani & Hidayati, 2022). Kebijakan tersebut lahir dari desakan masyarakat setempat atas perilaku perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial (Disemadi & Prananingtyas, 2020). Oleh karena itu, etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial semakin penting untuk memastikan bahwa perusahaan

dapat beroperasi secara berkelanjutan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Lingkungan asing yang cenderung berbeda dari lingkungan domestik merupakan halangan utama bisnis internasional dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Standar etis yang tinggi diperlukan untuk menjaga hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan seperti mitra bisnis, pemerintah, masyarakat lokal, pelanggan, dan investor (Tambunan et al., 2022). Selain itu, keberlanjutan juga merupakan faktor yang penting karena dapat mempengaruhi kesinambungan dan kemampuan perusahaan untuk tetap beroperasi di masa depan. Di luar tujuan utamanya untuk menghasilkan laba, tanggung jawab sosial juga merupakan suatu hal yang penting mengingat bahwa penerapan CSR dalam operasi bisnis dapat menciptakan citra merek dan hubungan yang positif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan (Afifah et al., 2021).

Perhatian masyarakat terhadap lingkungan bukan lagi hal yang dapat dipandang sebelah mata oleh perusahaan sebagai unit bisnis. Tujuan perusahaan tidak boleh hanya berorientasi pada laba secara finansial jangka pendek saja, tetapi juga mengarah pada laba jangka panjang. Laba jangka panjang dapat dicapai apabila perusahaan memerhatikan alam secara terintegrasi dalam strategi perusahaan (Brown & Deegan, 1998; Butler, 2011). Hal ini disebabkan manusia dan alam memiliki interaksi secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan alam (Bourdeau, 2004).

Pembangunan berkelanjutan menurut World Commission On Environmental Development (WCED) tahun 1987 adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Definisi tersebut, apabila ditinjau lebih luas, menjelaskan bahwa aktivitas bisnis yang dikembangkan saat ini sangat erat dengan kelestarian lingkungan jangka panjang. Oleh karena itu, isu lingkungan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam bisnis.

Perusahaan perlu memikirkan upaya pengimbangan laju ekonomi dengan upaya konservasi lingkungan alam dan

melahirkan paradigma ekonomi yang memasukkan isu lingkungan ke dalamnya. Fernandes dan Souto (2009) menjelaskan bahwa untuk memasukkan aspek lingkungan ke dalam paradigma ekonomi bukanlah hal yang mudah. Perlu ada pemahaman etika terhadap lingkungan dari pemangku kepentingan. Adanya kesadaran etika terhadap lingkungan merupakan proses jangka panjang bagi individu, organisasi, ataupun sekelompok masyarakat luas. Manusia harus menyadari bahwa interaksi antarmanusia membawa dampak langsung ataupun tidak langsung terhadap lingkungan.

Manning, Valliere, dan Minteer (1999) menjelaskan bahwa manusia tidak hanya fokus pada diri sendiri (antroposentis), tetapi harus fokus pada kehidupan makhluk hidup lain di sekitarnya (biocentric) dan kesinambungan hubungan antara manusia dan alam (ecocentric). Apabila manusia hanya fokus pada kepentingannya sendiri dengan mengabaikan alam dan lingkungan, maka tidak akan terwujud kehidupan jangka panjang. Makhluk hidup lain juga harus dipandang memiliki kepentingan tersendiri yang berhak untuk hidup. Artinya, dalam konsep biocentric, antara manusia dan alam memiliki hak yang sama untuk hidup. Dalam konsep ecocentric, manusia menjaga keselarasan kepentingannya dengan kepentingan alam. Dalam hal ini terjadi hubungan timbal balik yang selaras antara manusia dan alam (Bourdeau, 2004).

Garriga dan Mele (2004) menjelaskan bahwa upaya perusahaan dalam mencerminkan nilai etika lingkungan di dalam aktivitas bisnisnya adalah dengan menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam menginformasikan kegiatan CSR kepada stakeholders, tentunya perlu pengungkapan. Suttipun dan Stanton (2012) menyimpulkan hasil penelitiannya terhadap 75 perusahaan yang listing di bursa efek pada 2007 untuk menguji hubungan antara pengungkapan lingkungan dan berbagai karakteristik perusahaan di negara berkembang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 62 perusahaan (83%) menyediakan informasi lingkungan dalam laporan tahunan. Perusahaan yang bergerak dalam industri sumber daya alam menyusun pengungkapan informasi lingkungan yang lebih lengkap dibandingkan dengan industri agrikultur dan makanan.

Pengungkapan informasi lingkungan didasarkan pada beberapa alasan, antara lain permintaan dari stakeholder, tekanan dari aturan, kekuatan dari organisasi lingkungan, pengaruh kompetitor dan perusahaan multinasional, peningkatan produktivitas dan daya saing.

Gunawan (2015b) memaparkan bahwa pengungkapan perusahaan mengenai CSR lebih lengkapnya dipaparkan perusahaan dalam laporan keberlanjutan (sustainability report). Pengungkapan dalam laporan keberlanjutan mengacu pada Global Reporting Initiative (GRI) versi ke-4 (G4). Acuan pada G4 ini menggeser pemahaman arti penting dari laporan keberlanjutan yang menekankan kuantitas pengungkapan menjadi kualitas pengungkapan. Ukuran kualitas adalah relevansi dari informasi pengungkapan dan materialitas dari informasi tersebut bagi pemangku kepentingan. Namun, sifat pengungkapan informasi dalam laporan keberlanjutan setiap tahunnya masih sukarela. Artinya, tidak ada paksaan atau kewajiban bagi perusahaan untuk melaporkan informasi aktivitas sosial dan lingkungan dalam laporan tersendiri cukup di dalam bagian CSR laporan tahunan.

Gunawan (2010) melakukan penelitian mengenai pengungkapan informasi di dalam laporan tahunan guna memenuhi kebutuhan informasi CSR oleh stakeholder. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa informasi lingkungan merupakan informasi yang dianggap tidak terlalu penting bagi pemangku kepentingan secara rata-rata, padahal ketertarikan stakeholder, terutama investor, terhadap perusahaan yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan sangat meningkat. Penanganan terhadap isu lingkungan dapat meningkatkan image perusahaan (Hansen & Mowen, 2015; Gunawan, 2015a). Pengungkapan informasi lingkungan dianggap tidak terlalu penting baik oleh pemangku kepentingan maupun perusahaan karena kesadaran atas pentingnya pengungkapan isu lingkungan belum disadari oleh perusahaan dan masih kurang tekanan dari masyarakat, pemerhati lingkungan dan sanksi dari pemerintah. Selain itu, Figge dkk. (2002) menjelaskan bahwa perhatian perusahaan terhadap lingkungan sangat rendah karena pandangan perusahaan bahwa tanggung jawab terhadap

lingkungan merupakan biaya bagi perusahaan. Namun, dipandang dari sisi lain, aktivitas tanggung jawab lingkungan dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam kinerja ekonomi perusahaan.

9.2 Legitimacy Theory

O'Donovan (2002) berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*) karena terjadi hubungan timbal balik antardua entitas, yaitu perusahaan dan lingkungan..

Legitimacy is dynamic in that the relevant public continuously evaluate corporate output, method, and goals against an ever-evolving expectation. The legitimacy gap will fluctuate without any changes in action on the part of the corporation. Indeed, as expectation of the relevant publics change the corporation must make changes or the legitimacy gap will grow as the level of conflict increases and the levels of positive and passive support decreases.

Legitimasi mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran masyarakat dan lingkungan yang disebut sebagai legitimacy gap. Pergeseran ini dapat terjadi sendiri tanpa ada tindakan apa pun oleh perusahaan karena sifat legitimasi dinamis. Perusahaan harus dapat menyesuaikan perubahan tersebut baik melalui produk, metode, maupun tujuan yang dijalankan. Apabila penyesuaian terhadap legitimacy gap tidak dilakukan, akan menimbulkan konflik.

Dengan kata lain, legitimacy gap dapat dijelaskan sebagai perbedaan antara ekspektasi yang diharapkan dari stakeholder terhadap aktivitas entitas dan kondisi aktual atas aktivitas entitas di dalam masyarakat. Oleh karena itu, entitas berupaya memperkecil legitimacy gap yang ada, tetapi adanya tantangan kondisi eksternal yang tidak dapat dikendalikan (Merchant & Stede, 2012). Teori Legitimasi menjadi dasar bagi informasi

lingkungan kepada para pemangku kepentingan (Brown & Deegan, 1998; Deegan & Gordon, 1996; Guthrie & Parker, 1990; O'Donovan, 2002; Wilmshurst & Frost, 2000).

Keterkaitan teori legitimasi dengan etika berangkat dari pemahaman (Merquior, 1980) yang menjelaskan bahwa legitimasi mengandung dua makna dasar, yaitu power dan norm. Pada ranah yudisial, legitimasi mengandung arti penyerahan kepada otoritas yang berkuasa dan siap menjalankan aturan yang ditetapkan. Hal ini sama maknanya dengan legitimus yang berarti law (hukum). Pada ranah sosial, legitimasi mengandung makna norma.

Nilai-nilai etika di dalam perusahaan harus terus diadaptasi dengan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat yang selalu dinamis. Dengan terus menjaga legitimasi perusahaan dan lingkungan, perusahaan dapat meningkatkan kinerja ekonominya sebagai sasaran jangka panjang.

9.3 Etika Lingkungan

Keraf (1998) menjelaskan bahwa etika lingkungan membahas manusia sebagai individu dan sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas dalam totalitasnya, dan juga hubungan antara manusia yang satu dan lainnya yang berdampak langsung atau tidak langsung pada lingkungan hidup secara keseluruhan.

Pembahasan etika lingkungan merupakan hal penting dalam bisnis karena interaksi bisnis sangat memengaruhi lingkungan dan berdampak bagi generasi yang akan datang. Kesadaran atas etika lingkungan membawa dampak bagi kinerja ekonomi yang diukur secara luas seperti diungkap dalam Global Reporting Initiative (GRI) – G4, yaitu aspek finansial, dampak ekonomi tidak langsung, proses pengadaan dan keberadaan pasar.

Kok et al. (2001) mendefinisikan CSR sebagai berikut *the obligation of a firm to use its resources in ways to benefit society, through committed participation as a member of society, taking into account the society at large and improving welfare of society at large, independent of direct gains of the company*

Definisi di atas menjelaskan bahwa CSR merupakan tindakan yang membawa kebaikan bagi masyarakat pada masa yang akan datang dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Disebutkan di atas bahwa CSR tidak hanya memenuhi kewajiban atas peraturan yang berlaku, tetapi lebih dari itu harus membawa manfaat bagi masyarakat.

Social responsibility berdasarkan ISO 26000 : 2010 didefinisikan sebagai tanggung jawab organisasi atas dampak putusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat serta lingkungan secara transparan dan perilaku etik.

Dari definisi di atas, setidaknya ada empat aspek penting yang perlu diperhatikan.

1. Tidak hanya perusahaan yang harus terkait dengan tanggung jawab sosial, tetapi seluruh bentuk organisasi yang termotivasi atas standar ISO 26000 untuk bertindak dalam ranah yang bertanggung jawab secara sosial.
2. Sebelum sebuah organisasi mengambil putusan, sebaiknya dipertimbangkan dampak yang timbul akibat putusan tersebut, kemudian mempersiapkan rencana tindakan yang bertanggung jawab atas dampak yang timbul. Seluruh aktivitas organisasi dipandu oleh putusan mereka. Aktivitas organisasi mengarahkan rantai nilai yang disebut SIPOC (supplier, input, process, output and consumer).
3. ISO 26000 : 2010 menjelaskan bahwa lingkup dampak pengambilan putusan mencakup masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu contohnya sehubungan pengambilan putusan untuk membeli dari supplier lokal ataupun supplier luar negeri, selain mempertimbangkan harga juga carbon footprint yang ada.
4. Pengungkapan indikator yang terkait dengan CSR lingkungan di dalam GRI G4 dijelaskan dalam EN 1 – 34, yang mencakup aspek bahan, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, efluen dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan, dan transportasi, asesmen pemasok atas lingkungan, pengadaan.

Dimensi keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi bagi pemangku

kepentingannya dan terhadap sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Kategori ekonomi menggambarkan arus modal di antara pemangku kepentingan yang berbeda dan dampak ekonomi utama dari organisasi di seluruh lapisan masyarakat.

Pengukuran kinerja ekonomi menurut GRI – G4 terbagi atas sembilan indikator yang dikelompokkan menjadi empat aspek, yaitu ekonomi, keberadaan pasar, dampak ekonomi tidak langsung, praktik pengadaan.

9.4 Etika Lingkungan dan Kinerja Ekonomi

Hubungan antara etika lingkungan dan kinerja ekonomi belum ditemukan dalam beberapa referensi jurnal, tetapi pengaruh etika lingkungan terhadap kinerja tetap dapat dijelaskan. Perusahaan yang menanamkan etika lingkungan di dalam aktivitasnya tentu tidak akan memengaruhi kinerja ekonomi secara jangka pendek. Refleksi etik terhadap lingkungan akan memengaruhi kinerja ekonomi secara jangka panjang. Kinerja ekonomi yang telah dijelaskan sebelumnya mencerminkan peningkatan secara finansial dan mengurangi dampak negative externalities terhadap lingkungan.

Konsep etika deontologi yang dikemukakan dalam Keraf (1998) menjelaskan bahwa pelaksanaan etika merupakan suatu kewajiban yang sifatnya mengharuskan. Perbuatan dikatakan beretika apabila dilaksanakan sesuai dengan proses yang benar. Orientasi bukan secara hasil. Adanya UU yang mengatur tanggung jawab sosial dan tekanan dari stakeholder dapat menjelaskan bahwa pengungkapan CSR yang bersifat mandatori dapat diterima secara beretika dan akan membawa pengaruh pada kinerja ekonomi. Selain itu, Zsolnai (2011) menjelaskan bahwa etika lingkungan akan membawa dampak keberlanjutan bisnis jangka panjang dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang akan meningkatkan kualitas alam. Selain itu, keselarasan manusia dengan alam akan membawa dampak bagi kesejahteraan manusia.

Pendapat di atas, apabila diperluas, dapat dimaknai bahwa etika lingkungan akan membawa keberlangsungan bagi

bisnis melalui keselarasan dengan alam yang dijelaskan melalui pencapaian kinerja ekonomi. Penelitian Huang dan Kung (2011) memperkuat pendapat tersebut atas melalui hasil penelitiannya yang menguji pengaruh kesadaran lingkungan pada keunggulan bersaing perusahaan. Penelitian yang menggunakan sampel sebanyak 227 responden menjelaskan bahwa kesadaran lingkungan akan membawa dampak pada peningkatan kinerja ekonomi berupa peningkatan pertumbuhan finansial, keunggulan bersaing, pengurangan dampak polusi, produk yang berkualitas dan ramah lingkungan. Paradigma keberlanjutan merupakan nilai-nilai yang tercermin dalam etika perusahaan. Hal inilah yang menjadi dasar perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya (Bourdeau,2004; Radyati,2014; O' Donovan,2000; Loumbeve, 2008). Perusahaan yang menanamkan etika lingkungan akan menerapkan aktivitas CSR terhadap lingkungan dan melaporkan kepada pemangku kepentingan sebagai wujud pertanggungjawabannya. Etika menjadi dasar dalam pelaksanaan CSR karena menyangkut hak dan kewajiban (model deontologi) dari pemangku kepentingan perusahaan, di antaranya masyarakat dan lingkungan. Mereka harus diperlakukan secara adil. Artinya, aktivitas perusahaan tidak boleh mengganggu kesejahteraan masyarakat atau merusak lingkungan (Deegan, 2002; Hasnas, 1998).

Banyak motif yang mendasari perusahaan menjalankan praktik CSR dan menyajikan informasi kepada pemangku kepentingan, antara lain menciptakan image perusahaan (Gunawan, 2015a; Adams, 2002), mempertahankan reputasi perusahaan dan mengikatkan karyawan (Ali & Ali, 2011; Leaniz & Bosque, 2013), memberikan informasi pemegang saham dalam pengambilan putusan investasi (Wilmshurst & Frost, 2000), memenuhi kewajiban hukum (Deegan, 2002; Ahmad & Sulaiman, 2004), mencapai kinerja yang lebih baik (Orlitzky, Schmidt & Rynes, 2003)

Gunawan, Djajadikerta, dan Smith (2008) melakukan penelitian dengan mengambil sampel seluruh perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek Indonesia periode 2003–2006 untuk melihat aspek pengungkapan yang paling banyak dijelaskan perusahaan terkait CSR. Penelitiannya menggunakan teknik

content analysis dari laporan tahunan perusahaan. Hasilnya adalah aspek lingkungan berada pada urutan keempat dari delapan aspek pengungkapan, berturut-turut sumber daya manusia, produk, komunitas/masyarakat, lingkungan, hubungan eksternal, energi, informasi lainnya dan keberlanjutan. Milne, Owen, dan Tilt (2000) juga menjelaskan hasil penelitian yang serupa untuk perusahaan di Australia dan New Zealand. Pengungkapan CSR lebih diarahkan kepada aspek komunitas dan masih kurang untuk aspek lingkungan.

Orlitzky, Schmidt, dan Rynes (2003) melakukan penelitian pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan untuk menguji good management theory (Waddock & Graves, 1997) dengan menganalisis sampel data yang diobservasi sebanyak 33,878 data dari 52 penelitian sebelumnya. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa CSR lingkungan tidak berpengaruh pada kinerja keuangan. Namun, lain halnya dengan penelitian Mahoney dan Roberts (2007) yang menguji pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja perusahaan dengan mengambil sampel 352 data perusahaan di Kanada dari tahun 1997–2000 yang terdaftar di bursa efek. Dari penelitian itu diperoleh bahwa pengungkapan atas kinerja lingkungan merupakan faktor yang sangat dominan dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang diukur dengan peningkatan Return On Asset dan Return On Equity.

Isu lingkungan yang saat ini menjadi tren topik bagi pemangku kepentingan perusahaan masih ditanggapi kurang serius oleh perusahaan. Pengungkapan lingkungan yang merupakan bagian dari CSR pun masih belum menjadi prioritas. Perusahaan menganggap bahwa aktivitas terkait lingkungan merupakan beban. Namun, apabila isu lingkungan menjadi perhatian perusahaan, kinerja ekonomi perusahaan dalam jangka panjang dapat meningkat.

Penelitian ini mengambil populasi dari 68 perusahaan di Indonesia yang memublikasikan laporan keberlanjutan tahun 2014 yang mampu memberikan penjelasan bahwa etika lingkungan akan memberikan pengaruh pada kinerja ekonomi dengan CSR sebagai variabel mediasi. Etika lingkungan tidak dapat menjelaskan pengaruh secara langsung kepada kinerja

ekonomi karena etika merupakan nilai-nilai yang bersifat abstrak sehingga perlu penerapan nyata dalam pencapaian sasaran yang diharapkan. Etika lingkungan menjadi dasar penerapan CSR lingkungan.

Saran bagi praktik bisnis adalah penerapan etika lingkungan dapat memberikan pengaruh pada kinerja dalam jangka panjang, tetapi harus diaplikasikan melalui aktivitas CSR dan diungkap kepada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan saat ini sudah semakin kritis dalam mengevaluasi kinerja perusahaan yang tidak hanya melihat profit sebagai tujuan satu-satunya, tetapi 3P, termasuk di dalamnya lingkungan.

9.5 Etika Bisnis

Berbicara mengenai etika bisnis, sebenarnya berbicara mengenai etika yang mencakup bagaimana bisnis dijalankan secara adil (*fairness*) dan sesuai dengan hukum yang berlaku (*legal*). Pembahasan mengenai etika bisnis, tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai etika. Kata 'etika' berasal dari kata Yunani *ethos* yang mengandung arti yang cukup luas yaitu, tempat yang biasa ditinggali, kandang, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Bentuk jamak *ethos* adalah *ta-etha* yang berarti adat kebiasaan.

Di dalam perusahaan, label bisa digambarkan dalam bentuk kode etik yang distandarkan perusahaan. Standar ini didasarkan dari nilai-nilai yang berkembang yang kemudian dikumulatikan dengan nilai-nilai tradisi dan budaya yang ada di perusahaan. Etika dapat menjadi kaidah dasar sebagai acuan bertindak entitas semua elemen yang ada dalam perusahaan. Dinamisasi perusahaan selalu melibatkan internal dan eksternal perusahaan. Dalam prakteknya perusahaan akan selalu berurusan dengan semua elemen yang ada, baik itu karyawan, pemegang saham, konsumen, komunitas, stakeholder, dan lingkungan. Setelah kita memahami mengenai etika, barulah kita dapat memahami etika bisnis.

Etika bisnis adalah standar moral, tata nilai dan persepsi yang berlaku dalam masyarakat yang menganggap para pelanggarnya bukanlah orang yang beradab, bermartabat rendah dan sebagainya, oleh karena itu berbisnis dengan etika bisnis adalah menerapkan aturan-aturan umum mengenai etika pada perilaku bisnis. Dalam kondisi seperti ini etika bisnis menyangkut moral, kontak sosial, hak-hak dan kewajiban, prinsip-prinsip dan aturan-aturan.

Bisnis yang baik tidak sekedar mencari keuntungan, tetapi memiliki misi yang luhur yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuat hidup manusia lebih manusiawi melalui pemenuhan kebutuhan secara baik. Bisnis yang baik (*good business*) bukan saja yang menguntungkan, tetapi juga yang baik secara moral atau etika. Penerapan dan pelaksanaan etika bisnis dalam kegiatan bisnis sehari-hari harus terus menerus dan konsisten dijalankan oleh para pengusaha sehingga tingkat terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis semakin hari semakin menurun.

9.6 Etika Bisnis berbasis Akuntansi Lingkungan

Perusahaan memerlukan dukungan dari *stakeholders* seperti pemegang saham, pegawai, konsumen, kreditur, supplier, pemerintah dan aktivis untuk dapat mencapai tujuan jangka panjangnya. Dukungan untuk bisnis secara umum tergantung pada kredibilitas penempatan *stakeholders* dalam komitmen perusahaan. Kini *stakeholder* menginginkan kegiatan perusahaan akan lebih menghargai kepentingan dan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, dalam arti yang luas perusahaan diminta untuk menentukan sikap etis dalam mencapai kesuksesan. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan perubahan terhadap penilaian keberhasilan perusahaan yakni (Dharmayanti, 2011):

1. Urusan lingkungan

Dimulai dari masalah pencemaran udara yang berfokus pada pipa asap pabrik yang menyebabkan iritasi pada masyarakat sekitar pabrik. Selain pencemaran udara, yang harus diperhatikan adalah pencemaran air.

2. Sensivitas moral
Berkaitan dengan tekanan publik akan adanya keadilan dalam ketengakerjaan. Hal tersebut kini telah tercantum dalam hukum, peraturan, kontrak dan kegiatan-kegiatan perusahaan.
3. Penilaian buruk dan aktivis
Tekanan masyarakat atau kelompok tertentu menyerang instansi dinilai buruk, seperti perusahaan Indorayon yang diboikot karena membuang limbah dengan proses yang tidak standar. Para investor berpandangan bahwa investasi mereka seharusnya tidak hanya untuk mendapatkan pendapatan namun juga untuk masalah-masalah etis.
4. Ekonomi dan tekanan persaingan
Perkembangan pasar global yang memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mendistribusikan produknya ke seluruh dunia. Oleh karena itu diperlukan restrukturisasi yang memungkinkan produktivitas yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah.
5. Skandal keuangan kesenjangan ekspektasi dan kesenjangan kredibilitas
Penyalahgunaan jabatan dalam bidang keuangan telah membuat krisis kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan dan pemerintah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan ekspektasi dimana seharusnya pihak perusahaan menyampaikan keadaan perusahaan sebenarnya malah melakukan manipulasi.
6. Kegagalan kepemimpinan dan penilaian resiko
Pemerintah menyadari penting untuk melindungi kepentingan publik, dimana dewan direksi perusahaan telah memperkirakan penilaian dan meyakini bahwa resiko yang dihadapi oleh perusahaan telah diatur dengan baik, serta resiko etika kini telah menjadi aspek kunci proses pencapaian tujuan perusahaan.
7. Peningkatan keinginan transparansi
Kurangnya kepercayaan stakeholder akan kegiatan yang dijalani perusahaan menimbulkan kegiatan investor dan stakeholder yang lain.

8. Sinergi semua faktor dan penguatan institusional
Hubungan diantara semua faktor berdampak pada ekspektasi publik terhadap masalah etika. Dimana akibatnya masyarakatnya akan lebih sadar akan pentingnya kontrol terhadap perilaku perusahaan yang tidak etis. Kesadaran publik tersebut berimbas pada dunia politik, yang menyatakan reaksinya dalam hal penyusunan hukum dan peraturan. Hal tersebut akan mengakomodasi kesadaran publik dalam proses penguatan institusi dan penegakan hukum.

9.7 Peran Etika dalam Bisnis Internasional

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis internasional, perusahaan harus beroperasi di lingkungan asing yang beragam, seperti kekuatan politik, ekonomi, persaingan, dan budaya (Siripipatthanakul, 2021). Etika merupakan unsur yang sangat penting dalam bisnis internasional karena lingkungan bisnis internasional seringkali berbeda dari lingkungan bisnis domestik. Standar etis yang tinggi diperlukan untuk menjaga hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan seperti mitra bisnis, pemerintah, masyarakat lokal, pelanggan, dan investor (Tambunan et al., 2022).

Secara umum, etika merupakan refleksi kritis mengenai hal yang harus dan hal yang tidak boleh dilakukan (Bertens, 2014). Dalam konteks bisnis, etika merupakan suatu kode etik yang mengatur perilaku anggota perusahaan dengan pihak internal dan eksternal berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang berlaku pada suatu daerah (Rahimaji, 2019). Etika memainkan peran penting dalam pelaksanaan bisnis internasional. Pada negara asing di mana perusahaan beroperasi, kehadiran etika dapat membantu memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab dan adil di negara tersebut.

Dalam pelaksanaan bisnis internasional, etika berperan untuk menetapkan standar moral yang diharapkan pada perusahaan yang beroperasi di negara asing. Standar ini membantu memastikan bahwa perusahaan tidak terlibat dalam

praktik yang merugikan, seperti korupsi, eksploitasi tenaga kerja, atau pelanggaran hak asasi manusia. Di samping itu, etika juga membantu perusahaan dalam menjaga hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis internasional. Hal ini merupakan sesuatu yang krusial mengingat bahwa hubungan yang baik dapat membantu perusahaan dalam memperoleh lisensi, izin, maupun dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat.

Sebuah perusahaan yang baik harus menerapkan etika bisnis dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya karyawan, pelanggan, investor, masyarakat, dan lingkungan (Hasoloan, 2018). Dengan mematuhi etika bisnis yang baik, perusahaan dapat meningkatkan reputasinya di negara operasional, sehingga kepercayaan pelanggan, karyawan, dan investor juga akan mengalami peningkatan secara tidak langsung (Nandiwardhana, 2020). Selain itu, etika juga berperan penting dalam menjaga konsistensi keputusan bisnis. Dalam menghadapi budaya, nilai, dan norma yang berbeda-beda pada setiap negara, etika bisnis menjadi pedoman utama dalam melaksanakan keputusan terkait kegiatan dalam bisnis internasional.

Etika bisnis, keberlanjutan, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) masing-masing memiliki peran yang penting dalam kegiatan bisnis internasional. Ketiga faktor yang saling terkait dalam bisnis internasional ini memainkan manfaat dalam memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di seluruh dunia. Etika bisnis memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab dan berintegritas dalam lingkungan internasional yang kompleks dan beragam, mengingat perbedaan budaya, nilai, dan hukum yang berbeda-beda di setiap negara dan wilayah. Sementara itu, praktik bisnis yang berkelanjutan menjadi semakin penting dalam bisnis internasional karena adanya tekanan lingkungan dan sosial yang semakin meningkat, serta tuntutan konsumen dan pemerintah yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari bisnis.

Ketika beroperasi pada lingkungan dan negara tertentu, perusahaan juga harus mempertimbangkan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan setempat. Dengan menerapkan CSR dalam operasionalnya, perusahaan akan mampu mengembangkan kegiatan yang berkelanjutan dan bermanfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan di seluruh dunia. Perusahaan yang mengintegrasikan etika bisnis, keberlanjutan, dan CSR ke dalam strategi bisnisnya dapat memperoleh manfaat jangka panjang, seperti memperkuat reputasi perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., Astuti, S. W. W., & Irawan, D. 2021. PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN REPUTASI PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(3), 346-364. <https://doi.org/10.24034/J25485024.Y2021.V5.I3.4644>
- Bertens, K. 2007. Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Kanisius. Business. *Asian Journal of Applied Business and Management*, 1(1), 11-18. <https://doi.org/10.55927/AJABM.V1I1.1726>
- Brown, N., & Deegan, C. (1998). The public disclosure of environmental performance information-a dual test of media agenda setting theory and legitimacy theory. *Accounting & Business Research*, 29(1), 21-42.
- Bourdeau. (2004). The man - nature relationship and environmental ethics. *Journal of Environmental Radioactivity*, 72, pp. 9-15.
- Butler, Janet B, et al. (2011). Sustainability and the balance scorecard: Integrating green measures into business reporting. *Jurnal Management Accounting Quarterly*, 12(2).
- Deegan, C. (2002). The legitimising effect of social and environmental disclosure - a Theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282-343.
- Deegan, C., & Gordon, B. (1996). A study of the environmental disclosure practices of Australian corporations. *The Accounting Review*, 26(3), 187-200.
- Figge, F., Hahn, T., Schaltegger, S., Wagner, M. (2002). The sustainability balanced scorecard - linking sustainability management to business strategy. *Business Strategy and The Environment Journal*, 11, pp. 269- 284.
- Gunawan, J. (2010). Perception of important information in corporate social disclosures: Evidence from Indonesia. *Social Responsibility Journal*, 6 (1), pp. 62-71.

- Gunawan, J. (2015a). Corporate Social Disclosure in Indonesia: Stakeholder's Influence and Motivation. *Social Responsibility Journal*, 11(3), pp. 535- 552.
- Gunawan, J. (2015b). Buku panduan laporan keberlanjutan: Prinsip menentukan isi dan kualitas. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hansen, D. R. dan Mowen, M. M. (2015). Cornerstones of cost management. Canada: Cengage Learning.
- Handayani, E., & Hidayati, N. (2022). PERANAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP INOVASI UKM MELALUI ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 19(1), 21-28. <https://doi.org/10.33370/JMK.V19I1.725>
- Kartawinata, B. R., Wardhana, A., & Syahputra. (2014). *Bisnis Internasional* (S. Sonjaya (ed.)). PT. Karya Manunggal Lithomas. https://www.researchgate.net/publication/327068991_Bisnis_Internasional
- Keraf, S. (1998). *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kok, P., Wiele, T., McKenna, R., & Brown, A. (2001). A corporate social responsibility audit within a quality management framework. *Journal of Business Ethics*, 31(4), 285-297.
- Manning R, Valliere W, Minter B. (1999). Value ethics and attitudes toward national forest management: An empirical study. *Society and Natural Resources*, 12, pp. 421-436.
- Merchant, K. A. & van der Stede, W. A. (2012). *Management control system performance measurement, evaluation, and incentives*. England: Pearson Education Limited.
- Merquior, J. G. (1980). *Rousseau and Weber. Two studies in the theory of legitimacy*. London: Routledge and Kegan aul Ltd.
- Milne, M. J., Owen, D. L., & Tilt, C. A. (2000). *Environmental reporting in Australia and New Zealand: Corporate reactions to best practice*. Commerce Research Paper Series, Flinders University, South Australia.

- Nandiwardhana, B. (2020). ETIKA KOMUNIKASI PUBLIC RELATIONS DALAM MENJAGA CITRA PERUSAHAAN. *JCommsci - Journal of Media and Communication Science*, 3(3), 228–240. <https://doi.org/10.29303/JCOMMSCI.V3I3.90>
- O'Donovan, G. (2002). Environmental disclosures in the annual report : Extending the applicability and predictive power of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), pp. 344-371..
- Orlitzky, M., Schmidt, F. L, & Rynes, S. L. (2003). Corporate social and financial performance : A meta analysis. *Organization Studies*, 24(3), pp. 403 - 441.
- Rahimaji, A. (2019). ETIKA BISNIS PADA PT XYZ. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1(2), 146– 152. <https://doi.org/10.31933/JIMT.V1I2.71>
- Siripipatthanakul, S. (2021). Advanced International Business: A Review Article. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.3907266>
- Suryanto, & Kurniati, P. S. (2022). Analisis Perdagangan Internasional Indonesia dan Faktor- Faktor yang Memengaruhinya. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 104– 122. <https://doi.org/10.24198/INTERMESTIC.V7N1.6>
- Suttipun, M. & Stanton, P. (2012). Determinants of environmental disclosure in Thai corporate annual reports. *International Journal Of Accounting and Financial Reporting*, 2, 1, pp. 99-115.
- Tambunan, B. A. Y., Sitanggang, E., & Sintia, I. (2022). The Importance of Applying Ethics in
- Zsolnai, L. (2010). Environmental ethics for business sustainability. *International Journal of Social Economics*, 38 (11), pp.892-899.

BIODATA PENULIS



Hardianti Pertiwi, S.E.,M.M

Dosen Program Studi Perdagangan Internasional
Fakultas Bisnis Universitas Mega Buana Palopo

Penulis lahir di Baliase pada 31 Agustus 1995, dan menyelesaikan pendidikan dasar sampai SMA di Masamba, Kab. Luwu Utara. Lulus Sarjana (S-1) Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2017, dan kemudian penulis menyelesaikan Magister Manajemen (S-2) dari Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2019. Penulis memulai karir dengan menjadi dosen tetap di Universitas Mega Buana Palopo pada tahun 2020. Penulis juga memiliki beberapa usaha dan karya ilmiah berupa buku serta karya ilmiah lainnya di beberapa Jurnal Ekonomi. Motto penulis adalah “berikanlah kebaikan dan senyuman kepada sesama.” penulis bisa dihubungi melalui email: hardiantipertiwi.hp@gmail.com

BIODATA PENULIS



Renika Hasibuan, S.E., M.Si

Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS)
Universitas Sari Mutiara Indonesia

Renika Hasibuan, S.E., M.Si adalah Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS) Universitas Sari Mutiara Indonesia, dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Akuntansi. Lahir dari Desa Lumbanrau, 29 Agustus 1985. Mengampu mata kuliah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Praktikum Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Perpajakan. Aktif di berbagai penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain aktif menjadi dosen, Alumni S-1 Akuntansi Universitas Darma Agung (lulus 2009) dan S-2 di Universitas Sumatera Utara (lulus 2013) ini juga menjadi konsultan accounting di STTBM sampai sekarang, sebelumnya Ibu dari dua anak ini juga pernah berkarir sebagai Auditor di Kreston Internasional, dan merintis bisnis jual beli perabot dengan nama Tania Perabot. E-mail : renikahasibuan2016@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Ika Prayanthi, SE, MM, Ak
Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Klabat

Lahir di Airmadidi pada tanggal 25 Juni 1986. Profesi pekerjaan penulis adalah sebagai dosen pada program studi akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Klabat. Saat penyusunan buku ini, penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Manajemen konsentrasi Akuntansi Keuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Menyelesaikan Pendidikan Profesi Akuntan pada Tahun 2023 di Universitas Sam Ratulangi, Pendidikan Magister Manajemen konsentrasi keuangan di Universitas Klabat tahun 2011 serta Pendidikan Sarjana Ekonomi program studi akuntansi di Universitas Klabat tahun 2007. Penulis aktif dalam beberapa penulisan ilmiah yang dipublikasikan baik dalam level nasional maupun internasional sejak tahun 2011 hingga tahun 2022. Penulis juga adalah reviewer aktif untuk artikel penelitian baik nasional maupun internasional.

BIODATA PENULIS



Annisa Nabila Hasan, S.E., M.E., MSc, CSRS

Dosen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran

Penulis lahir di Bandung tanggal 26 Januari 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran dan S2 pada Jurusan *Corporate Social Responsibility* University of Nottingham. Penulis menekuni bidang akuntansi dan keberlanjutan.

BIODATA PENULIS



Arnadi Chairunnas, SE., M.Acc., Ak., CA., AFA.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Penulis lahir di Ujung Pandang, tanggal 11 Januari 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi, Universitas Halu Oleo dan melanjutkan S2 dan Profesi Akuntan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini, penulis aktif sebagai dosen dan juga praktisi di bidang akuntansi dan audit.

BIODATA PENULIS



**Dr. Fenny Marietza, SE.,M.Ak., CertBV., CertIFR., CFrA., CRP.,
CGIC**

Dosen Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Penulis lahir di Jakarta tanggal 01 April 1983. Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Surabaya pada tahun 2004, S2 pada Prodi Magister Akuntansi, Universitas Airlangga Surabaya dan S3 pada Prodi Ilmu Manajemen dengan konsentrasi pada bidang Finance di Universitas Bengkulu. Penulis juga konsultan bisnis pada RS Rafflesia Bengkulu, dan saat ini menjabat sebagai anggota satuan pengawasan internal Universitas Bengkulu. Email : fmarietza@unib.ac.id

BIODATA PENULIS



Sasmita Nabila Syahrir, SE.,M.,Ak.,Ak.,CA.,ACPA.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Penulis lahir di Kendari tanggal 2 Mei 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Halu Oleo Kendari dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Dan menyelesaikan pendidikan profesi di Universitas Hasanuddin Makassar.

BIODATA PENULIS



I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi, SE., M.Si

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa

Penulis lahir di Denpasar-Bali pada tanggal 23 Mei 1992. Pendidikan S1 dibidang akuntansi diselesaikan di Universitas Udayana, dan S2 (Magister) akuntansi di Universitas Udayana. Saat ini penulis sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa serta aktif dalam penelitian dan memiliki publikasi ilmiah di jurnal nasional maupun internasional.